

PROGRAM PEMBERDAYAAN PENDAMPINGAN
MASYARAKAT DESA
(Studi Kasus pada Masyarakat Desa Kaloling Kecamatan Sinjai Timur
Kabupaten Sinjai)



PROPOSAL

OLEH:

IRSAL AMIR
10538 02130 11

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
JURUSAN PENDIDIKAN SOSIOLOGI

2017

PROGRAM PEMBERDAYAAN PENDAMPINGAN
MASYARAKAT DESA
(Studi Kasus pada Masyarakat Desa Kaloling Kecamatan Sinjai Timur
Kabupaten Sinjai)



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Sosiologi
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh
IRSAL AMIR
10538 02130 11

JURUSAN PENDIDIKAN SOSIOLOGI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Progr
(Stud
Timur Kabupaten Sinjai).

rakat Desa
matan Sinjai

Nama : Irzal Amir

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama **Irsal Amir**, NIM 105380213011 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 049 Tahun 1439 H/ 2018 M, Sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar **Sarjana Pendidikan** pada Prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, Yudisium pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018.

17 Ramadhan 1439 H
Makassar, -----
02 Juni 2018 M

PANITIA UJIAN

Pengawas Umum : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM

Ketua : Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.

Sekretaris : Dr. Baharullah, M.Pd.

Penguji :

1. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM

2. Dr. Muhammad Nawir, M.Pd.

3. Drs. Hambali, S.Pd., M.Hum.

4. Suardi, S.Pd., M.Pd.

Mengetahui

Dekan FKIP
Universitas Muhammadiyah Makassar


Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
NBM: 860.93

Ketua Program Studi
Pendidikan Sosiologi


Drs. H. Nurtlin, M.Pd.
NBM: 575.474

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **IRSAL AMIR**

Nim : 10538 02130 11

Program Studi : Pendidikan Sosiologi

Judul Skripsi : **Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa**

(Studi Kasus pada Masyarakat Desa Kaloling Kec. Sinjai Timur

Kab. Sinjai)

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan didepan TIM penguji adalah asli hasil karya saya sendiri bukan ciplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Sinjai, April 2018
Membuat Pernyataan

IRSAL AMIR

Disetujui oleh.

Pembimbing I



Dr. H. Abd. Rahman Rahim, S.E., MM.

Pembimbing II



Jamaluddin Arifin, S.Pd., M.Pd.

SURAT PERJANJIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **IRSAL AMIR**
Nim : 10538 02130 11
Jurusan : Pendidikan Sosiologi
Judul : **Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa (Studi
Kasus pada Masyarakat Desa Kaloling Kec. Sinjai Timur
Kab. Sinjai)**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai Skripsi saya, saya akan menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Dalam penyusunan skripsi saya, saya akan selalu melakukan konsultasi dengan pembimbing yang telah ditetapkan oleh pimpinan Fakultas.
3. Saya tidak akan melakukan penciplatan dalam penyusunan Skripsi saya.
4. Apabila saya melanggar perjanjian, seperti butir 1, 2, dan 3 maka saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, April 2018

Yang membuat perjanjian

IRSAL AMIR

Diketahui oleh,
Ketua Jurusan
Pendidikan Sosiologi

Drs. H. Nurdin, M.Pd.
NBM : 575 474

ABSTRAK

IRSAL AMIR, 2018, “*Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus pada Masyarakat Desa Kaloling Kec.Sinjai Timur Kab. Sinjai)*”. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh H. Abd. Rahman Rahim (Pembimbing I) dan Jamaluddin Arifin (Pembimbing II)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi masyarakat dalam mendorong pelaksanaan P3MD, mengetahui bentuk pendampingan masyarakat P3MD dan mengetahui dampak sosial P3MD terhadap pendampingan masyarakat di Desa Kaloling Kab. Sinjai. Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan memahami realitas sosial tentang pemberdayaan masyarakat Desa Kaloling. informan yang diteliti adalah masyarakat yang berada di Desa Kaloling Kec. Sinjai Timur bersatu.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa realisasi program dibidang pendampingan masyarakat Desa telah terealisasi. Kemanfaatan program pendampingan masyarakat sudah efektif. Selain itu Program Pembangunan Pemberdayaan P3Md ini juga mampu memberikan kenyamanan berupa fasilitas desa seperti pembangunan jalan paving block, perintisan jalan tani, pembangunan drainase.

Kata kunci : **Pembangunan desa, pendampingan desa, pemberdayaan masyarakat.**

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta telah memberikan kekuatan dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus pada Masyarakat Desa Kaloling Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai)”**.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis menghadapi berbagai hambatan dan kesulitan. Penulis menyadari bahwa melangkah untuk mencapai suatu tujuan, hambatan dan rintangan menemani silih berganti. Namun, berkat rahmat dan hidayah-Nya disertai usaha dan doa serta dorongan motivasi dari teman-teman seperjuangan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak segala hambatan dan kesulitan yang dihadapi penulis dapat teratasi.

Penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta salam penuh hormat dengan segenap cinta ananda haturkan kepada kedua orang tua saya yang selalu mencurahkan cinta dan kasih sayang serta keikhlasan dalam mendidik penulis dengan segala jerih payahnya serta selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1).

Penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih juga penulis haturkan kepada Dr. Abd. Rahman Rahim, MM., selaku pembimbing I dan Bapak Jamaluddin Arifin, S.Pd., M.Pd., selaku pembimbing II atas kesediaannya

mencurahkan tenaga, waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis, mulai dari penyusunan proposal hingga skripsi ini dapat dirampungkan.

Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan dengan hormat kepada : Dr. Abd. Rahman Rahim, MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar. Dr. H. Andi Sukri Syamsuri, M.Hum., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah menyetujui dan menerima skripsi penulis. Dr. H. Nursalam, M.Si., Ketua Jurusan Pendidikan Sosiologi Universitas Muhammadiyah Makassar. Muhammad Akhir, S.Pd., M.Pd., Sekretaris Jurusan Pendidikan Sosiologi Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak memberikan arahan, petunjuk dan bimbingan selama kuliah sehingga proses penyelesaian studi.

Seluruh Bapak dan Ibu dosen Jurusan Pendidikan Sosiologi yang telah memberikan banyak ilmu dan berbagi pengalaman selama penulis menimba ilmu di Jurusan Pendidikan Sosiologi Universitas Muhammadiyah Makassar.

Buat sahabat-sahabat seperjuangan di Jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unismuh Makassar khususnya angkatan 011 kelas C terima kasih atas kebersamaan dan kekompakan kita selama ini yang penuh keceriaan dan saling membantu.

Tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota masyarakat desa, tenaga pendamping, Program Pemberdayaan Pendampingan Masyarakat Desa (P3MD) serta Kepala Desa Keloling beserta Staf-stafnya di Desa

kaloling Kec. Sinjai Timur yang telah bersedia meluangkan waktu membantu penulis dalam proses pengumpulan data untuk penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT kita memohon semoga berkat dan rahmat serta limpahan pahala yang berlipat ganda selalu dicurahkan kepada kita dan semoga niat baik, suci serta usaha yang sungguh-sungguh mendapat ridho disisi-Nya. Amin Ya Rabbal Alamin.

Makassar, Apri 2018l

Penulis

DAFTAR GAMBAR

Bagan	Halaman
Bagan Skema Kerangka Pikir	36

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran	81

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR	
PEMBIMBING	iv
.....	
SURAT PERNYATAAN	v
SURAT PERJANJIAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR	
	GAMBAR
.....	xi
.....	
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Konsep Pemberdayaan Masyarakat	9
B. Eksistensi P3MD sebagai Program Pemberdayaan	

Masyarakat Desa Kaloling	17
C. Dampak Sosial	23
D. Kajian Teori	32
E. Kerangka Pikir	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Waktu dan Tempat Penelitian	37
C. Fokus Penelitian	37
D. Data dan Sumber Data	38
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Teknik Analisis Data	39
G. Teknik Keabsahan Data	40
BAB IV GAMBARAN DAN HISTORIS LOKASI PENELITIAN	41
BAB V RESPON MASYARAKAT DALAM MENDORONG	
PELAKSANAAN P3MD	49
BAB VI BENTUK PENDAMPINGAN MASYARAKAT P3MD	54
BAB VII DAMPAK SOSIAL P3MD TERHADAP PENDAMPINGAN	
MASYARAKAT	73
BAB VIII PENUTUP	
A. Kesimpulan	77
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan serangkaian usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana serta berkelanjutan yang dilaksanakan oleh suatu bangsa dengan harapan membawa perubahan dan pertumbuhan guna mempercepat modernisasi kehidupan bangsa dalam rangka pencapaian tujuan akhir bangsa tersebut. Sejalan dengan tujuan utama pembangunan nasional yaitu untuk meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat, maka dalam pembangunan pertanian kesejahteraan petani perlu mendapat perhatian dan tingkat pendapatan yang meningkat bisa dijadikan salah satu indikator kesejahteraan petani.

Desa Kaloling termasuk salah satu Desa di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai dan merupakan Desa hasil pemekaran dari Desa Saukang, Desa Kaloling mulai berdiri pada tahun 1987 sebagai desa persiapan selama kurang lebih 3 (Tiga) tahun, yang menjadi Plt. Kepala desa persiapan adalah Muh. Aras dan menjadi desa definitip pada tahun 1990, dan diadakan pemilihan kepala Desa secara Demokratis dari 4 Calon, maka yang terpilih menjadi kepala desa adalah Muh. Aras, dengan luas wilayah 5,09 Km².

Secara umum kondisi perekonomian desa kaloling ditopang oleh beberapa mata pencaharian warga masyarakat dan dapat teridentifikasi kedalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti: PNS/TNI/Polri, Guru swasta, Guru Honor, karyawan swasta, pedagang, wirausaha, pensiunan, tukang kayu, dan lain-lain.

Jumlah penduduk Desa Kaloling pada tahun 2015 ada sebanyak 505 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah penduduk 1.812 jiwa yang terdiri dari 942 laki-laki dan 910 perempuan.

Masalah kesejahteraan sosial merupakan masalah yang cukup urgen di tengah masyarakat saat ini, salah satu indikator keberhasilan dalam pembangunan di desa tentu harus melihat sejauh mana tingkat kesejahteraan masyarakatnya baik itu dari segi ekonomi, pendidikan dan budaya. Melihat kondisi hari ini kabupaten Sinjai secara umum masih jauh dari konsep kesejahteraan, ini jelas terlihat dari kondisi dimana masih banyaknya masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap (Pengangguran) sehingga roda ekonomi di desa tidak berjalan baik.

Sesuai dengan amanat UU No 6 Thn 2014 konsep pembangunan desa yang menjadi indikator keberhasilan desa dimulai dari pembangunan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan infrastruktur desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan kemasyarakatan.

Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di sektor pemerintahan umum, Desa Kaloling telah sejak lama memberikan pelayanan antara lain berupa : pencatatan sipil/surat-surat keterangan perkawinan yang telah teradministrasi dengan baik.

Salah satu subjek pembangunan desa adalah masyarakat desa yang merupakan salah satu komponen utama dalam sistem pembangunan pertanian sehingga peran P3MD sangat menentukan dalam keberhasilan pembangunan desa. Salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan diadakannya program pemberdayaan

masyarakat desa yaitu pemerintah telah membentuk dan mengembangkan metode pembinaan serta berbagai kelembagaan yang di arahkan untuk tercapainya landasan yang kuat bagi petani untuk berswadaya.

Suatu kelompok sosial cenderung untuk tidak menjadi kelompok yang statis, tetapi akan selalu berkembang serta mengalami perubahan baik dalam aktivitasnya maupun bentuknya. Seperti halnya program pembangunan pemberdayaan masyarakat desa pasti mengalami perkembangan dan perubahan sebagai akibat dari proses perubahan pola-pola bentuk di dalam program tersebut baik yang disebabkan oleh anggota masyarakat itu sendiri maupun karena adanya pengaruh dari luar desa (Soekanto, 2010).

Peraturan Menteri Pertanian No. 273 tahun 2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan masyarakat mengamanatkan bahwa pendampingan masyarakat desa diarahkan pada peningaktan kesejahteraan masyarakat, peningkatan peranan, peran serta petani dan anggota masyarakat pedesaan lainnya dengan menumbuh-kembangkan kerjasama antar petani dan pihak lainnya yang terkait untuk mengembangkan usaha taninya. Selain itu, pembinaan desa diharapkan dapat membantu menggali potensi, memecahkan masalah usaha tani anggotanya secara lebih efektif dan memudahkan dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya.

Program Pendampingan P3MD dapat memberikan kesempatan membuka usaha yang dibentuk untuk mecapai tujuan bersama masyarakat desa dalam hal pemberdayaan masyarakat, namun untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya kerja sama antara anggota masyarakat desa dan pelaksanaan pinjaman dana

bergulir harus senantiasa terjaga agar tujuan-tujuan terbentuknya Program pendampingan P3MD tersebut bisa tercapai dan mendukung pemerintah.

Program pembangunan pendampingan masyarakat desa Kaloling Kec. Sinjai Timur dibentuk untuk mencapai tujuan bersama masyarakat desa dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya kerja sama antara anggota masyarakat desa dan kedinamisan kelompok harus senantiasa terjaga agar tujuan-tujuan terbentuknya P3MD tersebut bisa tercapai dan mendukung pemerintah.

Upaya-upaya pembangunan dan pemberdayaan desa tersebut telah dilaksanakan oleh pemerintah. Upaya tersebut seperti dilakukan pengaturan kembali tentang desa yang mana semula diatur dalam penjelasan UUD 1945, sekarang sudah diatur dalam pasal tersendiri yaitu Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. (Soewito, 2007 : 14) Ketentuan Pasal 18B ayat (2) tersebut dengan tegas menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati keberadaan desa-desa atau sebutan lain sesuai dengan kondisi sosial masyarakat setempat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat istiadat setempat atau berdasarkan hak otonomi asli ,namun tetap dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bunyi pasal 18B ayat (2) ini jelas bahwa pemerintah memberikan perhatian yang besar terhadap desa ini yaitu Negara memberikan otonomi seluas-luasnya terhadap pelaksanaan roda pemerintahan desa tersebut. (Soewito, 2007:14) Dengan berlakunya otonomi tersebut, kerangka perencanaan pembangunan desa tersebut mengalami perubahan yang dulunya perencanaan pembangunan bersifat top-bottom pada era orde baru, berubah menjadi bottom-up

yang dimulai pada era reformasi hingga sekarang. berlakunya otonomi tersebut juga telah mengembalikan desa-desa diseluruh Indonesia pada identitas aslinya yang pada era orde baru diseragamkan. Dengan berlakunya otonomi tersebut maka kembalilah desa-desa di provinsi NAD ini kedalam bentuk gampong (Qanun No.5 tahun 2003/ UU Syari'at Islam).

Selain upaya kejelasan di dalam pengaturan desa ini pemerintah juga menciptakan program-program pembangunan desa. Diantaranya seperti Inpres Desa Tertinggal (IDT) dan Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P4DT) dan program-program pembangunan lainnya. Di Desa Kaloling, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai terdapat banyak program-program pembangunan desa baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan pemberdayaan masyarakat desa. Salah satu program pembangunan yang diangkat penulis pada kesempatan kali ini adalah Program Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD).

Penulis memilih program P3MD dikarenakan menurut penulis suatu program akan mudah diukur tingkat keefektivannya apabila program tersebut sudah selesai dilaksanakan dibandingkan dengan program pembangunan yang masih dalam tahap perencanaan atau sudah dalam tahap pelaksanaan tetapi belum selesai dilaksanakan karena adanya suatu kendala tertentu. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya pada penelitian ini kita ingin melihat seberapa besar pengaruh kemampuan aparatur terhadap efektivitas pelaksanaan program pembangunan desa, tentunya program/kegiatan yang dipilih adalah program/kegiatan yang pihak pelaksananya adalah aparat desa bukan pihak luar

(swasta). Untuk itu menurut penulis program/kegiatan P3MD inilah yang memenuhi kriteria yang disebut diatas disbanding program/kegiatan yang lainnya.

Pada prinsipnya pelaksanaan program pembangunan desa merupakan suatu proses yang semestinya dilaksanakan secara baik dan terorganisir di setiap desa agar Efektivitas pelaksanaan program pembangunan dapat tercipta. Namun pada umumnya keadaan dan kondisi organisasi dan manajemen desa masih dalam keadaan lemah dan perlu ditingkatkan kualitas dan kapasitasnya serta kemampuan Aparatur pemerintahan Desa tersebut ditambah lagi dengan para tokoh/pemuka masyarakat dan para stakeholder atau pemangku kepentingan lainnya dalam menerima aspirasi masyarakat, menganalisa dan permasalahan yang dihadapi dan kemudian menyusun perencanaan desa secara partisipatif, pelaksanaan dan sistem evaluasi dan tindak lanjutnya yang berkesinambungan masih perlu ditingkatkan serta melihat dampak sosial yang akan dihasilkan.

Sebagaimana Schumacher (dalam Wasistiono 2006:41) menyatakan bahwa persoalan pokok yang dihadapi negara-negara berkembang terletak pada dua juta desa yang miskin dan terbelakang. Schumacher berpendapat bahwa selama beban hidup di pedesaan tidak dapat diringankan, masalah kemiskinan di dunia ini tidak dapat diselesaikan, dan mau tidak mau pasti akan lebih buruk. Selanjutnya shcumacher juga mengemukakan bahwa dari berbagai sebab kemiskinan, faktor-faktor material seperti kekurangan kekayaan alam, atau tak ada modal, tak cukup prasarana hanya merupakan sebab ke dua saja. Sebab-sebab uatamanya adalah kekurangan dibidang pendidikan, organisasi dan disiplin.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan mengangkat suatu permasalahan baru dengan judul **“Program Pemberdayaan Pendampingan Masyarakat Desa (Studi Kasus pada Masyarakat Desa Kaloling Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai).** Semoga penelitian ini dapat bermanfaat sesuai harapan penulis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah respon masyarakat dalam mendorong pelaksanaan P3MD di Desa Kaloling Kab. Sinjai?
2. Bagaimana bentuk pendampingan masyarakat P3MD di Desa Kaloling Kab. Sinjai?
3. Bagaimanakah dampak sosial P3MD terhadap pendampingan masyarakat di Desa Kaloling Kab. Sinjai?

C. Tujuan Penelitian

Bedasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kondisi masyarakat dalam mendorong pelaksanaan P3MD di Desa Kaloling Kab. Sinjai.
2. Untuk mengetahui bentuk pendampingan masyarakat P3MD di Desa Kaloling Kab. Sinjai.
3. Untuk mengetahui dampak sosial P3MD terhadap pendampingan masyarakat di Desa Kaloling Kab. Sinjai?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber informasi untuk mengenal, memahami dan mendalami tentang dampak sosial yang terjadi dalam masyarakat dan dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsi pengetahuan bagi masyarakat tentang program pendampingan desa, serta hubungan sosial masyarakat desa di Desa Kaloling Kab. Sinjai.

b. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan, tambahan informasi dan pertimbangan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan serta kebijakan pembangunan desa di masa yang akan datang untuk perbaikan dan pengembangan desa.

c. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta memberikan gambaran yang jelas mengenai program pendampingan P3MD di desa Kaloling di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai dan menjadi referensi untuk peneliti berikutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

1. Pemberdayaan Masyarakat

Secara lugas Zunadi (2010:1) mengartikan pemberdayaan dalam konteks masyarakat sebagai suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat. Dari definisi tersebut terlihat ada 3 tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat yaitu mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat, dan mengorganisir diri masyarakat. Kemampuan masyarakat yang dapat dikembangkan tentunya banyak sekali seperti kemampuan untuk berusaha, kemampuan untuk mencari informasi, kemampuan untuk mengelola kegiatan, kemampuan dalam pertanian dan masih banyak lagi sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Perilaku masyarakat yang perlu diubah tentunya perilaku yang merugikan masyarakat atau yang menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Contoh yang kita temui dimasyarakat seperti, anak tidak boleh sekolah, ibu hamil tidak boleh makan telur, yang membicarakan rencana pembangunan desa hanya kaum laki-laki saja, dan masih banyak lagi yang dapat kita temui dimasyarakat.

Pengorganisasian masyarakat dapat dijelaskan sebagai suatu upaya masyarakat untuk saling mengatur dalam mengelola kegiatan atau program yang mereka kembangkan. Disini masyarakat dapat membentuk panitia kerja, melakukan pembagian tugas, saling mengawasi, merencanakan kegiatan, dan lain-

lain. Lembaga-lembaga adat yang sudah ada sebaiknya perlu dilibatkan karena lembaga inilah yang sudah mapan, tinggal meningkatkan kemampuannya saja.

Berdasarkan uraian di atas jelas menunjukkan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses untuk menjadikan orang menjadi lebih berdaya atau lebih berkemampuan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, dengan cara memberikan kepercayaan dan kewenangan sehingga menumbuhkan rasatanggung jawab. Memberdayakan orang dapat dilakukan dengan cara memindahkannya dari posisi yang biasanya hanya melakukan apa yang disuruh, menjadi posisi lain yang memberikan kesempatan untuk lebih bertanggung jawab. Pemberdayaan dapat diawali dengan hanya sekedar memberikan dorongan kepada orang agar mau memainkan peran lebih aktif dalam pekerjaannya, sampai pada melibatkan mereka dalam mengambil keputusan atau tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.

Konsep partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam mendukung pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Tanpa partisipasi dan dukungan masyarakat sangat mustahil pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat berhasil dan memiliki manfaat bagi masyarakat. Keberadaan partisipasi masyarakat sebagai syarat dalam mendukung pembangunan di daerah merupakan sebuah hal yang diharuskan di era kebebasan dan keterbukaan informasi. Terutama pada kegiatan Musrenbang, konsep partisipasi masyarakat merupakan jiwa dan semangat yang mendasari kegiatan tersebut. Beberapa ahli memiliki pengertian yang beragam mengenai konsep partisipasi masyarakat. Partisipasi adalah 'take a part' atau ikut serta (Pei dalam Salain, 2001: 9).

Partisipasi masyarakat adalah proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi yang bertujuan untuk mengambil peranan serta ikut serta dalam mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi langsung kehidupan masyarakat (Sumarto, 2009: 37). Dari berbagai pengertian tentang partisipasi masyarakat pada intinya adalah adanya keterlibatan dan gotong royong masyarakat dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pembangunan, sehingga keseluruhan hasil yang diperoleh dalam proses pembangunan memiliki makna di mata masyarakat.

2. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan suatu bentuk peran serta atau keterlibatan masyarakat dalam program pembangunan. Partisipasi masyarakat ini menunjukkan bahwa masyarakat merasa terlibat dan merasa bagian dari pembangunan. Hal ini akan sangat berdampak positif terhadap keberhasilan pelaksanaan suatu program pembangunan (Soetomo, 2006).

Mikkelsen (2003), mengatakan bahwa pembangunan pada dasarnya merupakan proses perubahan sikap dan perilaku. Partisipasi masyarakat yang semakin meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif merupakan salah satu perwujudan dari perubahan sikap dan perilaku tersebut. Ada enam tafsiran dan makna berbeda tentang partisipasi yaitu:

1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat dalam suatu proyek pembangunan, tetapi mereka tidak ikut terlibat dalam pengambilan keputusan.

2. Partisipasi adalah proses untuk membuat masyarakat menjadi lebih peka untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek pembangunan.
3. Partisipasi adalah suatu proses aktif, yang bermakna bahwa orang ataupun kelompok terkait mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan sesuatu
4. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara komunitas lokal dan pihak penyelenggara, pengimplementasian, pemantauan, dan pengevaluasian staf agar dapat memperoleh informasi tentang konteks sosial ataupun dampak sosial.
5. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukan oleh dirinya sendiri.
6. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam upaya pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.

Partisipasi adalah keadaan dimana individu, keluarga, maupun masyarakat umum ikut serta bertanggung jawab terhadap kesehatan diri, keluarga ataupun kesehatan lingkungannya. Dalam suatu masyarakat bagaimanapun sederhananya, selalu ada suatu stimulus. Mekanisme ini disebut pemecahan masalah atau proses pemecahan masalah (Depkes, 2006).

Partisipasi adalah peran serta aktif anggota masyarakat dalam berbagai jenjang kegiatan. Dilihat dari konteks pembangunan kesehatan, partisipasi adalah keterlibatan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk menjalin kemitraan diantara berbagai aktivitas program kesehatan, mulai dari pendidikan kesehatan,

kemadirian dalam kesehatan, sampai dengan mengontrol perilaku masyarakat dalam menanggapi teknologi dan infrastruktur kesehatan (Notoatmodjo, 2005).

Menurut Ramli (1993), Pengertian partisipasi adalah sangat kompleks, sehingga tidak mudah untuk mendefinisikannya secara lengkap. Hal ini terlihat dari pengertian yang di kemukakan beberapa ahli berikut ini:

1. Partisipasi adalah suatu kontribusi sukarela dari masyarakat terhadap program pemerintah yang dapat menunjang pembangunan nasional tanpa turut serta dalam pembuatan program itu sendiri atau mengeritik tentang isinya.
2. Partisipasi dalam arti yang luas ialah menyadarkan masyarakat dan meningkatkan kepekaan dan kemampuan untuk memberikan respons terhadap program pembangunan dan juga mendorong prakarsa setempat.
3. Partisipasi meliputi keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program, mengambil bagian dalam hasilnya serta terlibat dalam evaluasi program tersebut.
4. Partisipasi dalam keterlibatan secara aktif dalam pengambilan keputusan sejauh hal-hal yang berkaitan dengan mereka.
5. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat yang berhak dan wajib ikut serta dalam memecahkan masalah (kesehatan), lebih bertanggung jawab dalam memperoleh kebutuhan (kesehatan), mengerahkan sumber-sumber lokal dan mengusulkan pemecahan masalah baru, juga menciptakan dan mempertahankan organisasi setempat.

6. Partisipasi adalah suatu proses aktif, artinya bahwa orang atau kelompok yang bersangkutan mengambil prakarsa dan memastikan kewenangannya (otonomi) untuk melakukan hal tersebut.
7. Partisipasi adalah upaya yang terorganisasi untuk menguasai (mengendalikan) sumber-sumber daya dan kelembagaan yang mengatur di dalam situasi sosial tertentu, bagi kelompok atau gerakan mereka yang selama ini tersisihkan dari penguasaan/pengendalian tersebut.

Dari definisi di atas belum mendapatkan batasan pengertian yang jelas, sehingga ada kemungkinan apa yang disebut partisipasi dalam suatu kegiatan belum tentu sama dengan kegiatan lainnya. Bagaimanapun luasnya interpretasi tentang partisipasi itu, suatu hal yang pasti ialah bahwa sebahagian besar dari kita sependapat bahwa partisipasi itu sesuatu hal yang baik dan merupakan strategi penting untuk pembangunan.

3. Inkulturasi

Tahapan awal yang dilakukan yaitu inkulturasi. Melakukan observasi langsung ke tempat tujuan dimana proses pendampingan akan dilakukan. Hal pertama yang dilakukan adalah melihat kondisi sekitar dengan memperhatikan keadaan dan kegiatan warga masyarakat. Melakukan wawancara dengan warga setempat untuk lebih banyak mencari informasi. Ikut serta dalam kegiatan warga masyarakat setempat untuk lebih mengenal kondisi lingkungan sekitar.

Setelah melakukan pendekatan dengan warga masyarakat sekitar, selanjutnya yaitu melakukan pendekatan dengan obyek yang akan dijadikan fokus penelitian dan pendampingan. Menetapkan beberapa informan untuk membantu

melengkapi data-data awal. Terdiri dari tiga orang pembuat anyaman tikar dan beberapa orang warga setempat yang mengetahui seluk beluk anyaman tikar daun pandan tersebut (orang yang dituakan). Pihak-pihak yang terkait dan ikut serta dalam membantu proses pendampingan.

a. Nilai-Nilai Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah suatu pendekatan atau jalan yang terbaik untuk pemecahan masalah-masalah kesehatan dinegara-negara yang sedang berkembang, karena hal-hal berikut (Notoatmodjo, 2007):

1. Partisipasi masyarakat adalah cara paling murah. Dengan ikut berpartisipasi masyarakat dalam program-program kesehatan, itu berarti diperoleh sumber daya dan dana dengan mudah untuk melengkapi fasilitas kesehatan mereka sendiri.
2. Bila partisipasi itu berhasil, bukan hanya salah satu bidang saja yang dapat dipecahkan, tetapi dapat menghimpun dana dan daya.
3. Partisipasi masyarakat membuat semua orang bertanggung jawab untuk kesehatannya sendiri.
4. Partisipasi masyarakat didalam pelayanan kesehatan adalah rangsangan dan bimbingan dari atas, bukan sesuatu yang dipaksakan dari atas. Ini adalah suatu pertumbuhan yang alamiah, bukan yang semu.
5. Partisipasi masyarakat akan menjamin suatu perkembangan yang langsung, karena dasarnya adalah kebutuhan dan kesadaran masyarakat.

6. Melalui partisipasi, setiap anggota masyarakat dirangsang untuk belajar berorganisasi, mengambil peran yang sesuai dengan kemampuan masing-masing

b. Faktor-Faktor Menumbuhkan Partisipasi Masyarakat

Menurut Cary dalam Notoatmodjo (2005), mengatakan bahwa partisipasi dapat tumbuh jika tiga kondisi berikut terpenuhi:

1. Merdeka untuk berpartisipasi, berarti ada kondisi yang memungkinkan anggota masyarakat untuk berpartisipasi.
2. Mampu untuk berpartisipasi, adanya kapasitas dan kompetensi anggota masyarakat sehingga mampu untuk memberikan sumbangan saran yang konstruktif untuk program.
3. Mau berpartisipasi, kemauan atau kesediaan anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam program.

Ketiga kondisi ini harus hadir secara bersama-sama. Apa bila orang mau dan mampu tetapi tidak merdeka untuk partisipasi, maka orang tidak akan berpartisipasi. Menurut Ross dalam Notoatmodjo (2005), terdapat tiga prakondisi tumbuhnya partisipasi, yaitu:

- a. Mempunyai pengetahuan yang luas dan latar belakang yang memadai sehingga dapat mengidentifikasi masalah, prioritas masalah dan melihat permasalahan secara komprehensif.
- b. Mempunyai kemampuan untuk belajar cepat tentang permasalahan, dan belajar mengambil keputusan.
- c. Kemampuan mengambil tindakan dan bertindak efektif.

Batasan diatas sebenarnya menuntut persyaratan bahwa orang-orang yang akan berpartisipasi akan harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu *kognisi* tertentu. Menurut Notoatmodjo (2005), yang mengutip pendapat Chapin, partipasi dapat diukur dari tinggi rendah sampai yang tertinggi, yaitu:

1. Kehadiran individu dalam pertemuan-pertemuan
2. Memberikan bantuan dan sumbangan keuangan
3. Keanggotaan dalam kepanitiaan
4. Posisi kepemimpinan.

B. Eksistensi P3MD sebagai Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Kaloling

Eksistensi berasal dari kata *exist* dalam bahasa inggris yang artinya ada. Eksistensi merupakan kata serapan dari bahasa inggris yang diartikan sebagai keberadaan yang menunjukkan akan suatu hal. (KBBI 2003:288). Dalam konteks penelitian ini eksistensi mengandung arti keberadaan. Keberadaan program Pendampingan P3MD pada masyarakat Desa Kaloling tetap di realisasikan.

1. Pendampingan

a. Definisi Pendampingan

Pendampingan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan dan dapat bermakna pembinaan, pengajaran, pengarahan dalam kelompok yang lebih berkonotasi pada menguasai, mengendalikan, dan mengontrol. Kata pendampingan lebih bermakna pada kebersamaan, kesejahteraan, samping manyamping, dan karenanya kedudukan antara keduanya (pendamping dan yang didampingi) sederajat, sehingga tidak ada dikotomi antara atasan dan bawahan.

Hal ini membawa implikasi bahwa peran pendamping hanya sebatas pada pengambil keputusan (Sulawesi Selatan, 2001).

Pendampingan berarti bantuan dari pihak luar, baik perorangan maupun kelompok untuk menambahkan kesadaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan pemecahan permasalahan kelompok. Pendampingan diupayakan untuk menumbuhkan keberdayaan dan keswadayaan agar masyarakat yang didampingi dapat hidup secara mandiri.

Pendampingan merupakan kegiatan untuk membantu individu maupun kelompok yang berangkat dari kebutuhan dan kemampuan kelompok yang didampingi dengan mengembangkan proses interaksi dan komunikasi dari, oleh, dan untuk anggota kelompok serta mengembangkan kesetiakawananan dan solidaritas kelompok dalam rangka tumbuhnya kesadaran sebagai manusia yang utuh, sehingga dapat berperan dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

b. Peran Pendampingan

Kelompok perlu didampingi karena mereka merasa tidak mampu mengatasi permasalahan secara sendirian dan pendamping adalah mendampingi kelompok. Dikatakan mendampingi karena yang melakukan kegiatan pemecahan masalah itu bukan pendamping. Pendamping hanya berperan untuk memfasilitasi bagaimana memecahkan masalah secara bersama-sama dengan masyarakat, mulai dari tahap mengidentifikasi permasalahan, mencari alternatif pemecahan masalah, sampai pada implementasinya.

Dalam upaya pemecahan masalah, peran pendampingan hanya sebatas pada memberikan alternatif-alternatif yang dapat diimplementasikan. Dan kelompok pendampingan dapat memilih alternatif mana yang sesuai untuk diambil. Pendamping perannya hanya sebatas memberikan pencerahan berfiki berdasarkan hubungan sebab akibat yang logis, artinya kelompok pendampingan disadarkan bahwa setiap alternatif yang diambil senantiasa ada konsekuensinya. Diharapkan konsekuensi tersebut bersifat positif terhadap kelompoknya.

Dalam rangka pendampingan ini, hubungan yang dibangun oleh pendamping adalah hubungan konsultatif dan partisipatif. Dengan adanya hubungan itu, maka peran yang dapat dimainkan oleh pendamping dalam melaksanakan fungsi pendampingan adalah peran motivator, peran fasilitator dan peran katalisator (BPKB Sulsel, 2001).

Peran-peran pendamping tersebut hanya akan dapat dilaksanakan secara maksimal jika pendamping memahami kelompok yang didampinginya, karena itu pendamping diupayakan dapat hadir di tengah mereka, hidup bersama mereka, belajar dari apa yang mereka miliki, mengajar dari apa yang mereka ketahui, dan bekerja sambil belajar

c. Pendampingan Desa

Upaya pemberdayaan masyarakat atau penggerakan peran aktif masyarakat melalui proses pembelajaran yang terorganisasi dengan baik melalui proses fasilitasi dan pendampingan.

Kegiatan pendampingan dan fasilitas diarahkan pada:

- a. Pengidentifikasian masalah dan sumber daya

- b. Diagnosis dan perumusan pemecahan masalah
- c. Penetapan dan pelaksanaan pemecahan
- d. Pemantauan dan evaluasi kelestarian

Keberhasilan pelaku pemberdayaan dalam memfasilitasi proses pemberdayaan juga dapat diwujudkan melalui peningkatan partisipasi aktif masyarakat. Fasilitator harus trampil mengintegrasikan tiga hal penting yakni optimalisasi fasilitasi, waktu yang disediakan, dan optimalisasi partisipasi masyarakat. Masyarakat pada saat menjelang batas waktu harus diberi kesempatan agar siap melanjutkan program pembangunan secara mandiri. Sebaliknya, fasilitator harus mulai mengurangi campur tangan secara perlahan. Tanamkan kepercayaan pada masyarakat yang selanjutnya akan mengelola program.

Berkaitan dengan jangka waktu keterlibatan fasilitator (pelaku pemberdayaan) dalam mengawal proses pemberdayaan terhadap warga masyarakat, Sumodiningrat (2000) menjelaskan bahwa, pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu mandiri, dan kemudian dilepas untuk mandiri, meskipun dari jauh tetap dipantau agar tidak jatuh lagi. Meskipun demikian dalam rangka menjaga kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi, dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran.

d. Proses Pendampingan

Sebagaimana sudah disinggung dalam uraian sebelumnya, unsur utama dari proses pendampingan masyarakat adalah pemberian kewenangan dan pengembangan kapasitas masyarakat. Kedua unsur tersebut tidak dapat

dipisahkan, oleh karena apabila masyarakat telah memperoleh kewenangan tetapi tidak atau belum mempunyai kapasitas untuk menjalankan kewenangan tersebut maka hasilnya juga tidak optimal. Masyarakat berada pada posisi marginal disebabkan karena kurang memiliki kedua unsur tadi, kewenangan dan kapasitas, kondisi tersebut sering juga disebut masyarakat kurang berdaya dan *powerless*, sehingga tidak mempunyai peluang untuk mengatur masa depannya sendiri. Hal itulah yang dianggap sebagai penyebab utama kondisi kehidupannya tidak sejatra.

Untuk memperoleh kewenangan dan kapasitas dalam mengelolah pembangunan, masyarakat perlu diberdayakan melalui proses pendampingan atau *empowerment*. Menurut pendapat korten (1987:7), memahami power tidak cukup dari dimensi distributif, berdasarkan terminologi personal, *power* dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain, menurut pendapatnya, sebagai dasar pemahaman pengertian pemberdayaan dalam pembangunan, *power* dalam dimensi generatif justru lebih penting. Suatu kelompok hanya akan memperoleh tambahan atau peningkatan *power* dengan mengurangi *power* kelompok lain. Kelompok yang bersifat *powerless* akan memperoleh tambahan *power* atau *empowerment*, hanya dengan mengurangi *power* yang ada pada kelompok *powerholders*.

Dengan asumsi bahwa masyarakat tidak berdaya karena Negara telah mengambil kewenangan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan, maka untuk menambah *power* bagi masyarakat melalui pemberdayaan harus mengurangi power yang dimiliki oleh negara. Melalui proses pemberdayaan, negara harus memberikan sebageaian kewenangannya atau

sebagian *power*nya kepada masyarakat. Ibaratnya keseluruhan *power* tersebut adalah kue yang besarnya tetap, dan didistribusikan kepada banyak pihak, maka agar pihak tertentu mendapat tambahan irisan kue tersebut, harus dilakukan dengan mengurangi irisan kue pihak yang lain.

e. Implementasi (Penerapan)

Operasionalisasi dari konsep pendampingan pada umumnya lebih difokuskan pada level komunitas. Hal itu disebabkan karena komunitas dianggap sebagai basis kehidupan masyarakat, dengan demikian apabila proses pembangunan harus dimulai dari bawah, maka awalnya harus berangkat dari kehidupan paling dasar ini. Di samping itu juga didasarkan pada asumsi, bahwa masyarakat pada tingkat komunitas sebagai basis kehidupanlah yang paling mengetahui persoalan dan kebutuhan yang paling aktual. Apabila program pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kehidupan masyarakat, maka program tersebut harus sesuai dengan persoalan dan kebutuhan masyarakat yang akan ditingkatkan taraf hidupnya. Pertimbangan lain adalah, bahwa dalam proses pembangunan yang menggunakan paradigma dan perspektif sebelumnya yang bersifat sentralistis, *top-down* dan berorientasi keseragaman, masyarakat terbawa pada tingkat komunitas inilah yang paling termarginalisasi, sehingga apabila harus dilakukan pemberdayaan maka prioritas harus diberikan kepada mereka. Oleh sebab itu dalam level yang lebih operasional, proses pemberdayaan masyarakat pada umumnya menggunakan pendekatan *community based development*, yang artinya bahwa pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan berbasis komunitas.

Sudah tentu dalam mengimplementasikan konsep dan pendekatan pemberdayaan tersebut perlu didukung oleh sejumlah langkah dan tindakan. Kesemuanya itu diperlukan untuk memperlancar, baik proses transformasi dan transisi dari paradigma lama ke paradigma baru, maupun dalam menjabarkan konsep pemberdayaan berbagai pendekatan yang digunakan oleh perspektif baru kedalam berbagai kegiatan yang lebih operasional. Dengan demikian dapat diminimalisasikan kemungkinan adanya hambatan yang justru datang dari para aktor pelaksanaan dan kemungkinan yang terjadi distorsi dalam operasionalisasi konsep. Bagaimanapun juga perlu di ingat, bahwa perspektif lama sudah digunakan dalam periode yang cukup panjang dan melibatkan berbagai stakeholder. Dengan demikian, tidak mungkin mengharapkan perubahan tersebut terjadi dengan serta merta karena membutuhkan proses penyesuaian dan transformasi.

C. Dampak Sosial

1. Pengertian Dampak Sosial

Pengertian dampak yaitu benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pendekatan secara sosiologis dapat diartikan sebagai penggunaan konsep dasar untuk menelaah sebuah gejala sosial, dalam arti dampak sosial merupakan sebuah efek dari sebuah fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Secara umum dampak sosial mempunyai dua sifat yaitu dampak sosial yang bersifat positif dan negatif.

Fukuyama (2001:04) mengatakan bahwa dampak sosial dibangun oleh kepercayaan-kepercayaan antar individu. Rasa saling percaya dibentuk dalam waktu yang tidak sebentar serta memerlukan proses-proses sosial yang berliku.

Dalam kehidupan sosial sendiri terdapat berbagai macam konsep sosiologi seperti interaksi sosial, kelompok sosial, lembaga sosial, lapisan sosial, perubahan sosial dan lain sebagainya. Kemudian dari konsep tersebut terjadi sebuah dinamisasi atau terjadi perubahan yang terjadi pada individu, kelompok atau masyarakat secara keseluruhan. Rujukan dari sebuah perubahan adalah dampak yang terjadi pada struktur masyarakat tersebut. Kecenderungan dampak sosial dan budaya sangat dekat dengan perubahan sosial dan budaya. Dalam hal ini pembahasan mengenai dampak positifnya yaitu peningkatan kesejahteraan sosial maupaun ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat Desa Kaloling Kecamatan Sinjai.

Dampak sosial adalah suatu kajian yang dilakukan terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat sebagai akibat dari pelaksanaan suatu kegiatan pembangunan di suatu wilayah atau area. Kajian dilakukan untuk menelaah dan menganalisa berbagai dampak yang terjadi baik positif maupun negatif dari setiap tahapan kegiatan mulai dari tahap pra konstruksi, konstruksi, sampai tahap operasi.

Dampak sosial (*social effect*) dapat didefinisikan sebagai dampak sosial terhadap kemampuan masyarakat untuk bekerja bersama, demi mencapai tujuan-tujuan bersama, di dalam berbagai kelompok. Sejumlah kejanggalan dan kegagalan tersebut muncul di permukaan karena para ekonom penganut mazab

neo-klasik menganggap bawa faktor-faktor kultural dari perilaku (*behavior*) manusia sebagai makhluk rasional dan memiliki kepentingan diri (*self interested*) menjadi sesuatu yang dikesampingkan.

Dampak sosial adalah bagian-bagian dari organisasi sosial seperti kepercayaan, norma dan jaringan yang dapat meningkatkan efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi tindakan-tindakan yang terkoordinasi. Dampak sosial juga didefinisikan sebagai kapabilitas yang muncul dari kepercayaan umum di dalam sebuah masyarakat atau bagian-bagian tertentu dari masyarakat tersebut. Selain itu, konsep ini juga diartikan sebagai serangkaian nilai atau norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalannya kerjasama.

Ada banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli tentang dampak social. Beragamnya definisi dari pada ahli biasanya tergantung pada objek riset mereka. Perbedaan objek riset itulah yang menyebabkan berbeda-bedanya harfiah definisi dampak sosial.

Dampak sosial memiliki peran yang sangat penting pada beberapa kelompok masyarakat dalam berbagai aktivitas. Namun Fukuyama juga mengatakan bahwa tidak semua norma, nilai dan budaya secara bersama-sama dapat saling melengkapi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Sama seperti halnya modal fisik dan modal finansial, modal sosial juga bisa menimbulkan dampak negatif.

Coleman (2009: 438) mendefinisikan dampak sosial sebagai pengaruh penting bagi para individu dan dapat sangat mempengaruhi kemampuan mereka

untuk bertindak dan kualitas kehidupan yang mereka rasakan. Masih dalam buku yang sama, Coleman (hal. 420) menggambarkan bahwa dampak sosial memudahkan pencapaian tujuan yang tidak dapat dicapai tanpa keberadaannya atau dapat dicapai hanya dengan perubahan social yang lebih tinggi”. Menurut Coleman dampak sosial tercipta ketika relasi antara orang-orang mengalami perubahan sesuai dengan cara-cara yang memudahkan tindakan. Dampak sosial tidak berwujud, sama seperti sikap manusia. Keterampilan dan pengetahuan yang ditunjukkan oleh seseorang atau sekelompok orang merupakan perwujudan sikap manusia. Demikian pula halnya dampak sosial karena diwujudkan dalam relasi di antara orang-orang.

Burf dalam Agus Supriono dkk (2009:3) mendefinisikan dampak sosial sebagai kemampuan masyarakat untuk melakukan asosiasi (berhubungan) satu sama lain dan selanjutnya menjadi kekuatan yang sangat penting, bukan hanya bagi kekuatan ekonomi tetapi juga pada setiap aspek eksistensi sosial yang lain.

Robert D. Putnam, (1993:169) seorang ahli Ilmu Politik asal Amerika mendefinisikan dampak sosial adalah sesuatu dampak karakteristik yang ada di dalam organisasi sosial, misalnya kepercayaan, norma, dan jejaring yang bisa memperbaiki efisiensi masyarakat melalui memfasilitasi aksi-aksi yang terkoordinasikan.

Definisi pertama Putnam ini disampaikan pada saat Putnam melakukan riset tentang tradisi politik di Italia. Artinya, partai politik akan menjadi partai yang besar, kuat, dan terus berjaya, apabila bisa membangun tiga hal, yaitu (i)

kepercayaan, (ii) norma yang berlaku dan ditaati bersama, dan (iii) jejaring yang kuat.

Defenisi dari Francis Fukuyama, (1995:12) yaitu dampak sosial adalah kemampuan para individu dalam beraktivitas secara tepat untuk mencapai tujuan bersama di dalam komunitas atau organisasi. Kata dampak social banyak digunakan dikalangan ekonomi zaman sekarang; dampak social tidak selalu identik hanyadengan tanah, peralatan, mesin, akan tetapi manusia karena memiliki pengetahuan dan ketrampilan adalah termasuk di dalamnya; maka dampak social ataupun kemampuan untuk beraktivitas dalam bagian yang saling terkait dengan orang lain adalah ketrampilan terpenting manusia maka tidak akan berhasil pemberdayaan masyarakat jika tidak ada kepercayaan, tidak ada penghargaan dan amanah/kejujuran).

2. Dimensi Dampak Sosial

Dampak sosial (*social effect*) berbeda definisi dan terminologinya dengan *human capital* (Fukuyama, 1995:40). Bentuk *human capital* adalah ‘pengetahuan’ dan ‘ketrampilan’ manusia. Investasi *human capital* konvensional adalah dalam bentuk seperti halnya pendidikan universitas, pelatihan menjadi seorang mekanik atau programmer computer, atau menyelenggarakan pendidikan yang tepat lainnya. Sedangkan modal sosial adalah kapabilitas yang muncul dari kepercayaan umum di dalam sebuah masyarakat atau bagian-bagian tertentu darinya. Dampak sosial dapat dilembagakan dalam bentuk kelompok sosial paling kecil atau paling mendasar dan juga kelompok-kelompok masyarakat paling besar seperti halnya negara (bangsa).

Dampak sosial ditransmisikan melalui mekanisme - mekanisme kultural seperti agama, tradisi, atau kebiasaan sejarah (Fukuyama, 2000:13). Dampak sosial dibutuhkan untuk menciptakan jenis komunitas moral yang tidak bisa diperoleh seperti dalam kasus bentuk-bentuk *human capital*. Akuisisi dampak sosial memerlukan pembiasaan terhadap norma-norma moral sebuah komunitas dan dalam konteksnya sekaligus mengadopsi kebajikan-kebajikan.

Menurut Burt (1992:65), kemampuan berasosiasi ini sangat tergantung pada suatu kondisi dimana komunitas itu mau saling berbagi untuk mencari titik temu norma-norma dan nilai-nilai bersama. Apabila titik temu etis-normatif ini diketemukan, maka pada gilirannya kepentingan-kepentingan individual akan tunduk pada kepentingan-kepentingan komunitas kelompok, seperti kesetiaan, kejujuran, dan *dependability*. Modal sosial lebih didasarkan pada kebajikan-kebajikan sosial umum.

Bank Dunia (1999:5) meyakini modal sosial adalah sebagai sesuatu yang merujuk ke dimensi institusional, hubungan-hubungan yang tercipta, dan norma-norma yang membentuk kualitas serta kuantitas hubungan sosial dalam masyarakat. Modal sosial bukanlah sekedar deretan jumlah institusi atau kelompok yang menopang (*underpinning*) kehidupan sosial, melainkan dengan spektrum yang lebih luas. Yaitu sebagai perekat (*social glue*) yang menjaga kesatuan anggota kelompok secara bersama-sama.

Dimensi dampak sosial tumbuh di dalam suatu masyarakat yang didalamnya berisi nilai dan norma serta pola-pola interaksi sosial dalam mengatur kehidupan keseharian anggotanya (Woolcock dan Narayan, 2000:14). Oleh karena

itu Adler dan Kwon (2000:32) menyatakan, dimensi modal sosial adalah merupakan gambaran dari keterikatan internal yang mewarnai struktur kolektif dan memberikan kohesifitas dan keuntungan-keuntungan bersama dari proses dinamika sosial yang terjadi di dalam masyarakat.

Dimensi dampak sosial menggambarkan segala sesuatu yang membuat masyarakat bersekutu untuk mencapai tujuan bersama atas dasar kebersamaan, serta didalamnya diikat oleh nilai-nilai dan norma-norma yang tumbuh dan dipatuhi (Dasgupta dan Serageldin, 1999:12).

Dimensi dampak sosial inheren dalam struktur relasi sosial dan jaringan sosial di dalam suatu masyarakat yang menciptakan berbagai ragam kewajiban sosial, menciptakan iklim saling percaya, membawa saluran informasi, dan menetapkan norma-norma, serta sangsi-sangsi sosial bagi para anggota masyarakat tersebut (Coleman, 1999:43).

Namun demikian Fukuyama (1995:36) dengan tegas menyatakan, belum tentu norma-norma dan nilai-nilai bersama yang dipedomani sebagai acuan bersikap, bertindak, dan bertingkah-laku itu otomatis menjadi modal sosial. Akan tetapi hanyalah norma-norma dan nilai-nilai bersama yang dibangkitkan oleh kepercayaan (*trust*). Dimana *trust* ini adalah merupakan harapan-harapan terhadap keteraturan, kejujuran, dan perilaku kooperatif yang muncul dari dalam sebuah komunitas masyarakat yang didasarkan pada norma-norma yang dianut bersama oleh para anggotanya. Norma-norma tersebut bisa berisi pernyataan-pernyataan yang berkisar pada nilai-nilai luhur (kebajikan) dan keadilan.

Setidaknya dengan mendasarkan pada konsepsi-konsepsi sebelumnya, maka dapat ditarik suatu pemahaman bahwa dimensi dari dampak sosial adalah memberikan penekanan pada kebersamaan masyarakat untuk mencapai tujuan memperbaiki kualitas hidupnya, dan senantiasa melakukan perubahan dan penyesuaian secara terus menerus. Di dalam proses perubahan dan upaya mencapai tujuan tersebut, masyarakat senantiasa terikat pada nilai-nilai dan norma-norma yang dipedomani sebagai acuan bersikap, bertindak, dan bertingkah-laku, serta berhubungan atau membangun jaringan dengan pihak lain.

Beberapa acuan nilai dan unsur yang merupakan dampak sosial antara lain: sikap yang partisipatif, sikap yang saling memperhatikan, saling memberi dan menerima, saling percaya mempercayai dan diperkuat oleh nilai-nilai dan norma-norma yang mendukungnya.

Dampak sosial terletak pada bagaimana kemampuan masyarakat untuk bekerjasama membangun suatu jaringan guna mencapai tujuan bersama. Kerjasama tersebut diwarnai oleh suatu pola interrelasi yang imbal balik dan saling menguntungkan serta dibangun diatas kepercayaan yang ditopang oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial yang positif dan kuat. Kekuatan tersebut akan maksimal jika didukung oleh semangat proaktif membuat jalinan hubungan diatas prinsip-prinsip sikap yang partisipatif, sikap yang saling memperhatikan, saling memberi dan menerima, saling percaya mempercayai dan diperkuat oleh nilai-nilai dan norma-norma yang mendukungnya.

3. Konsep-konsep Utama dalam Dampak Sosial

Berdasarkan berbagai definisi dari para ahli dampak sosial disini terdiri atas tiga hal yaitu (i) *Trust* (saling percaya), (ii) *Norms* (norma), (iii) (Pencapaian tujuan bersama).

- a. *Trust* (saling percaya) merupakan komponen penting dari adanya masyarakat. Masyarakat yang pada anggotanya tidak saling percaya, maka akan hancur. Saling percaya muncul tidak dengan tiba-tiba. Saling percaya akan muncul, manakala para anggotanya sudah saling menghargai dan saling jujur. Jadi sub-komponen dari *trust* adalah menghargai dan saling jujur. Maka, dari hal ini, ada larangan berbohong, larangan menghina, merendahkan orang lain, mencaci, memaki. Apabila para anggota masyarakat atau organisasi social sudah saling menghargai dan saling jujur, maka pasti akan muncul *trust* atau saling percaya.
- b. *Norms* (norma) merupakan Kelembagaan social pada dasarnya menyangkut seperangkat norma atau tata nilai dalam bertindak. Maka, dalam fungsi ini, bagi masyarakat, norma memberikan:
 - 1) Merupakan pedoman berperilaku bagi antar individu dan apa yang mesti mereka lakukan.
 - 2) Merupakan alat penjaga keutuhan eksistensi masyarakat tertentu. Suatu masyarakat akan disebut eksistensinya jika mereka memiliki norma yang berlaku dan disepakati bersama, apabila tidak ada maka tidak ada masyarakat melainkan hanya sekumpulan benda.
 - 3) Merupakan alat bagi sesama anggota dalam melakukan kontrol social.

- c. Pencapaian tujuan bersama adalah output dari semua dampak sosial adalah untuk mencapai tujuan bersama, baik masyarakat, kelompok maupun organisasi sosial. Manusia adalah makhluk yang bertujuan, semua tindakannya, baik pribadi maupun kolektif adalah untuk tujuan tertentu. Maka, dalam konteks kemasyarakatan, pasti ada tujuan-tujuan bersama yang hendak dicapai oleh mereka. Seperangkat tujuan bersama itulah yang merupakan sebab kenapa masyarakat mesti saling percaya.

D. Kajian Teori

1. Teori evolusi (*evolutionary theory*)

Perubahan sosial memiliki arah yang tetap yang dilalui oleh masyarakat. Semua masyarakat melalui urutan penahapan yang sama dan bermula dari tahap perkembangan menuju perkembangan akhir. Apabila tahapan terakhir telah tercapai, maka saat itu perubahan evolusioner telah berakhir. Prinsip terpenting dari teori evolusioner adalah tahapan masyarakat berawal dari kelahiran, pertumbuhan dan kesempurnaan.

Teori ini berpijak pada teori evolusi Darwin dan dipengaruhi oleh pemikiran Herbert Spencer. Tokoh yang berpengaruh pada teori ini adalah Emile Durkheim dan Ferdinand Tönnies. Durkheim berpendapat bahwa perubahan karena evolusi mempengaruhi cara pengorganisasian masyarakat, terutama yang berhubungan dengan kerja. Sedangkan Tönnies memandang bahwa masyarakat berubah dari masyarakat yang sederhana yang mempunyai hubungan yang erat dan kooperatif menjadi tipe masyarakat besar yang memiliki hubungan yang terspesialisasi dan impersonali. Artinya dengan adanya perubahan sosial membuat

masyarakat menjadi lebih individual dan sifat kemasyarakatannya semakin berkurang, ini dapat dilihat pada masyarakat perkotaan.

2. Teori fungsionalis (*Functionalist Theory*)

Teori ini memandang bahwa setiap elemen masyarakat memberikan fungsi terhadap elemen masyarakat lainnya. Perubahan yang muncul disuatu bagian masyarakat akan menimbulkan perubahan pada bagian yang lain. Masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan.

Perubahan yang terjadi pada satu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial fungsional terhadap yang lain. Sebaliknya kalau tidak fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya. Penganut teori ini cenderung untuk melihat hanya kepada sumbangan satu sistem atau peristiwa terhadap sistem yang lain dan karena itu mengabaikan kemungkinan bahwa suatu peristiwa atau sistem dapat beroperasi menentang fungsi-fungsi lainnya dalam suatu sistem sosial.

Menurut Lawer (dalam Wirawan 2012:43) teori ini mendasarkan pada tujuh asumsi, yaitu: (1) masyarakat harus dianalisis sebagai satu kesatuan yang utuh yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berinteraksi; (2) hubungan yang ada bisa bersifat satu arah atau hubungan yang bersifat timbal balik; (3) sistem sosial yang ada bersifat dinamis; (4) integrasi yang sempurna di masyarakat tidak pernah ada sehingga di masyarakat senantiasa timbul ketegangan-ketegangan dan penyimpangan-penyimpangan tetapi ketegangan dan penyimpangan ini akan

dinetralisasi lewat proses pelembagaan; (5) perubahan-perubahan akan berjalan secara gradual dan perlahan-lahan sebagai suatu proses adaptasi dan penyesuaian; (6) perubahan merupakan hasil penyesuaian dari luar, tumbuh oleh adanya diferensiasi dan inovasi; (7) sistem diintegrasikan lewat pemilikan nilai-nilai yang sama.

3. Teori siklus (*Cyclical Theory*)

Salah satu penganut teori siklus adalah Arnold Toynbee. Toynbee adalah seorang sejarawan Inggris yang menilai peradaban besar berada dalam siklus kelahiran, pertumbuhan, keruntuhan, dan kematian. Kemudian akan melahirkan peradaban baru, dan begitu seterusnya. Teori ini pada dasarnya menyatakan bahwa perubahan terjadi secara bertahap, namun setelah sampai pada tahap terakhir yang sempurna akan kembali ke tahap awal untuk melakukan perubahan yang selanjutnya. Prinsip utama teori siklus adalah bahwa perubahan sosial diawali dari kelahiran, pertumbuhan dan kejatuhan. Setelah itu masyarakat akan memulai tahap kelahiran kembali.

Teori ini mempunyai sudut pandang yang menarik dalam melihat perubahan sosial. Teori ini beranggapan bahwa perubahan sosial tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh siapapun bahkan orang-orang ahli sekalipun. Dalam setiap masyarakat terdapat siklus yang harus diikutinya. Menurut teori ini kebangkitan dan kemunduran suatu peradaban tidak dapat dielakkan dan tidak selamanya perubahan sosial membawa kebaikan.

E. Kerangka Pikir

Setiap penelitian pasti diperlukan adanya kerangka berpikir sebagai pijakan atau sebagai pedoman dalam menentukan arah dari penelitian, hal ini diperlukan agar penelitian tetap terfokus pada kajian yang akan diteliti. Alur kerangka berpikir pada penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut:

Program P3MD di Desa Kaloling saat ini mempunyai sistem pembangunan pertanian sehingga peran P3MD sangat menentukan keberhasilan pembangunan desa dan mengelola potensi-potensi yang di miliki oleh daerahnya sendiri baik dalam sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Seperti yang dilakukan oleh pemerintah setempat di Desa Kaloling yang mempunyai program untuk dijadikan sebagai tolak ukur, oleh karena itu Pemerintah Sinjai mengadakan Program Pendampingan Masyarakat Desa P3MD di Desa Kaloling sebagai desa pemberdayaan masyarakat kemudian memberikan bentuk pendampingan terhadap dampak sosial dan pola kehidupan masyarakat desa Kaloling.

BAGAN KERANGKA PIKIR

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses kegiatan penelitian yang dilakukan secara wajar dan natural sesuai dengan kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi atau rekayasa, serta jenis data yang dikumpulkan terutama data kualitatif. Salah satu ciri penelitian kualitatif adalah bersifat deskriptif di mana data yang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata, gambar dan bukan angka. Data-data tersebut lebih banyak bercerita mengenai objek penelitian sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan, mulai tanggal 22 Juli s/d 29 September 2017. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kaloling Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah masyarakat desa program pendampingan P3MD. Untuk mengetahui hal tersebut peneliti mengambil informasi dari beberapa responden yang diambil sebagai responden dengan teknik *purposive sampling* (pengambilan sampel berdasarkan tujuan).

Dalam hal ini peneliti memilih informan dari keseluruhan masyarakat atau anggota P3MD yang ada, yang dianggap mengetahui informasi secara mendalam

dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap dengan memperhatikan karakteristik responden yang telah ditetapkan meliputi umur, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan.

D. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini akan berpatokan pada dua macam sumber data yaitu:

1. Data primer yaitu data yang di peroleh langsung dari responden atau objek yang di teliti yang ada hubungannya dengan apa yang diteliti.
2. Data sekunder adalah data pelengkap yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi terkait, sumber ini dapat berupa buku, disertasi, ataupun tesis, majalah-majalah ilmiah, dan data-data statistik yang diterbitkan pemerintah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data adalah penunjang yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Semakin banyak data yang diperoleh maka semakin bagus pula hasil akhir dari suatu penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap obyek yang akan diteliti. Observasi ini dilakukan dengan cara peneliti mendatangi lokasi penelitian, selanjutnya melakukan pengamatan dan pencatatan tentang fenomena-fenomena yang akan diteliti di lokasi penelitian yaitu program pendampingan Desa P3MD di desa Kaloling Kecamatan Sinjai

Timur Kabupaten Sinjai, yang dilakukan secara berulang-ulang secara informal sehingga mampu mengarahkan peneliti untuk sebanyak mungkin mendapatkan informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian. Observasi ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang program pendampingan P3MD di desa Kaloling Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dipergunakan oleh peneliti dalam percakapan maupun tanya jawab baik secara langsung atau tidak langsung dengan responden yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan penelitian (Sutoyo dalam Tahir 2013:50)

3. Dokumentasi

Dokumentasi berupa, foto-foto anggota kelompok tani kakao yang di peroleh oleh peneliti. Sumber data dokumentasi dipergunakan untuk menguatkan keberadaan data yang telah diperoleh dilapangan melalui observasi dan wawancara.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut ditafsirkan. Semua data yang diperoleh oleh peneliti akan dianalisis secara kualitatif dengan melakukan pengolahan data dengan cara menuliskan, mengedit, mengklasifikasi, kemudian diuraikan dalam bentuk penjelasan untuk mendapatkan kesimpulan akhir.

G. Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengabsahan data merupakan salah satu faktor yang sangat penting, karena tanpa pengabsahan data yang diperoleh dari lapangan maka akan sulit seorang peneliti untuk mempertanggungjawabkan hasil penelitiannya. Dalam hal pengabsahan data, peneliti menggunakan metode triangulasi yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu (Sugiono, 2014:274).

1. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara lalu di cek dengan observasi dan dokumentasi.

2. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu digunakan untuk validitasi data yang berkaitan dengan perubahan suatu proses dan perilaku manusia, karena perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Untuk mendapatkan data yang sah melalui observasi peneliti perlu mengadakan pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan saja.

3. Triangulasi Sumber Data

Triangulasi sumber data dilakukan untuk menguji keabsahan data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber.

BAB IV

GAMBARAN DAN HISTORIS LOKASI PENELITIAN

A. Historis Kabupaten Sinjai

Kabupaten Sinjai mempunyai nilai historys tersendiri, dibanding dengan kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dahulu kabupaten sinjai terdiri dari beberapa kerajaan yang tergabung dalam federasi *Pitu Limpoe*. Tellu limpoe terdiri dari kerajaan-kerajaan yang berada dekat pesisir pantai, yakni kerajaan Tondong, Bulo-Bulo dan Lamatti, serta Pitu Limpoe, kerajaan-kerajaan yang berada di dataran tinggi yakni ; kerajaan Turunge, Manimpahoi, Terasa, Pao, Manipi, Suka dan Bala Suka.

Watak dan karakter masyarakat tercermin dari sistem pemerintahan demokrasi dan berkedaulatan rakyat. Komunikasi politik diantara kerajaan-kerajaan dibangun melalui landasan kesopanan, yakni "*Sipakatau*", yaitu saling menghormati, serta menjunjung tinggi nilai-nilai konsep "*Sirui Mendre' Tessirui No*" yaitu saling menarik keatas, pantang saling menarik kebawah, "*Mallilu Sipakainge*" yang bermakna bila saling mengingatkan.

Bila ditelusuri hubungan kerajaan-kerajaan yang ada di kabupaten sinjai pada masa lalu, maka nampak hubungan yang terjalin dengan erat oleh tali kekeluargaan, yang dalam bahasa bugis disebut "*Sijai*" artinya sama jahitannya. Eksistensi dan identitas kerajaan-kerajaan yang ada di kabupaten sinjai pada masa lalu semakin jelas dengan didirikannya benteng pada taun 1557. Benteng ini dikenal dengan nama benteng balangnipa. Sebab didirikan dibalangnipa yang sekarang menjadi ibu kota kabupaten sinjai. disamping itu, benteng ini pun

dikenal sebagai Benteng Tellulimpoe, karena didirikan secara bersama-sama oleh tiga kerajaan yakni, Lamatti, Bulo-Bulo, dan Tondong lalu dipugar oleh Belanda melalui perang Mangarabombang.

Tahun 1564 adalah tahun yang amat bersejarah bagi daerah Sinjai yang diwakili oleh kerajaan Bulo-Bulo yang mendapat banyak kunjungan dari dua kerajaan besar yang sedang berperang dan merebut pengaruh. Hal ini disebabkan karena letak daerah Sinjai yang berada pada lintas barat dan sangat strategis bagi kedua kerajaan yang sedang berperang tersebut mempunyai hubungan kekerabatan dengan kerajaan-kerajaan Sinjai, maka Tellu Limpoe dan Pitu Limpoe berupaya untuk tidak memihak atau terlibat dalam perang tersebut, bahwa dengan penuh kecerdikan dan kearifan, raja-raja di Sinjai berusaha mempertemukan pimpinan kerajaan tersebut agar berunding dan berdamai.

Pada bulan Februari 1564, raja Bulo-Bulo VI *La Mappasoko Lao Manoe Tanrunna* berhasil mempertemukan antara kerajaan Gowa yang diwakili oleh *I Mangerang Daeng Mammata* dan *La Tenri Rawe Bongkangnge* dari kerajaan Bone, disaksikan oleh raja-raja lain, sehingga lahirlah perjanjian perdamaian yang kemudian dikenal dengan perjanjian Topekkong atau *Lampung Patue Ritopekkong*. Disebut *Lampung Patue Ripatekkong* karena perundingan ini dilaksanakan dengan upacara penanaman batu besar, bagian batu yang dikuburkan dalam-dalam dimaksudkan sebagai simbol dikuburnya sikap-sikap keras yang merugikan pihak, sedangkan bagian batu yang timbul sebagai simbol persatuan yang tidak mudah bergeser.

Tahun 1636 orang belanda mulai datang ke daerah sinjai. kerajaan di sinjai menentang keras upaya belanda untuk memecah belah persatuan kerajaan-kerajaan yang ada disulawesi selatan. Hal ini mencapai puncaknya dengan terjadinya peristiwa pembunuhan terhadap orang-orang belanda yang mencoba membujuk kerajaan bulo-bulo untuk melakukan perang terhadap kerajaan gowa. Peristiwa ini terjadi tahun 1639. Hal ini disebabkan oleh rakyat sinjai tetap berpegang teguh pada perjanjian topekkong.

Pada masa pendudukan jepang, struktur pemerintahan dan namanya ditata sesuai dengan kebutuhan bala tentara jepang yang bermarkas di gojeng. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945, para rakyat kabupaten sinjai membentuk organisasi perlawanan, seperti: sumber darah rakyat atau sudara, kris muda dan lain-lain. Tanggal 20 oktober 1959 sinjai resmi menjadi kabupaten berdasarkan undang-undang RI No. 29 tahun 1959 dan pada tanggal 27 februari 1960 abdul lathief dilantik menjadi kepala daerah tingkat II yang pertama. Hingga saat ini kabupaten sinjai sudah dinahkodai oleh 7 (tujuh) orang pemimpin terbaik dan saat ini kabupaten sinjai dipimpin oleh H. Sabirin Yahya,S.Sos.

B. Letak Geografis Kabupaten Sinjai

Kabupaten sinjai adalah salah satu dari 24 kabupaten/ kota dalam wilayah provinsi sulawesi selatan yang terletak dipantai timur bagian jazirah sulawesi selatan yang berjarak kurang lebih 223 km dari kota makassar (ibu kota sulawesi selatan). Kabupaten sinjai yang memiliki luas 819,96 km².terdiri dari sembilan kecamatan defenitif dengan jumlah desa sebanyak 67dan 13 kelurahan.

Secara geografis sinjai terletak antara $5^{\circ}2'56''$ sampai $5^{\circ}21'16''$ lintang selatan dan antara $119^{\circ} 56' 30''$ sampai $120^{\circ} 25'33''$ bujur timur. Disebelah utara berbatasan dengan kabupaten Bone, di sebelah timur teluk Bone, disebelah selatan berbatasan dengan Bulukumba dan sebelah barat dengan kabupaten Gowa.

Secara morfologi, daerah ini lebih dari 55,5% dari daerah dataran tinggi (100-500 meter dari permukaan laut). Secara klimatologi terletak pada posisi iklim musim timur dimana bulan basah jatuh antara bulan april sampai oktober dan bulan kering antara oktober sampai april.

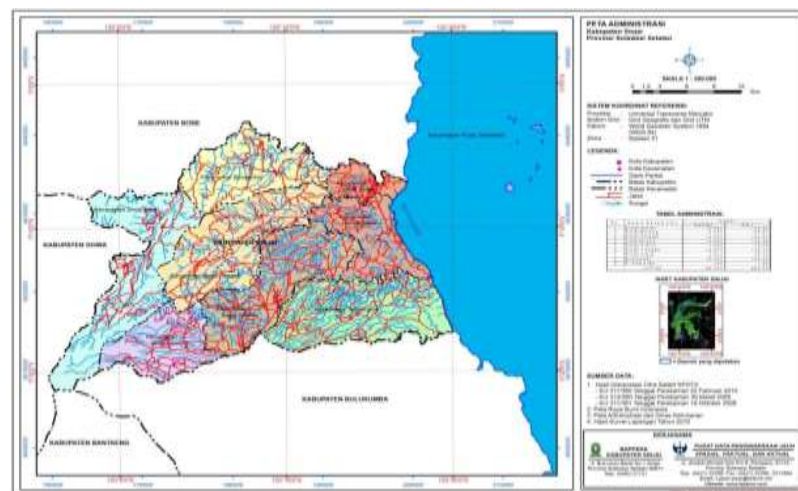
Secara administrasi, kabupaten sinjai mencakup beberapa kecamatan yakni terdiri dari 9 kecamatan, dari sembilan kecamatan tersebut terdiri dari 13 kelurahan dan 67 desa yaitu :

- a. Kecamatan sinjai utara, 6 kelurahan
- b. Kecamatan sinjai timur, 1 kelurahan dan 12 desa
- c. Kecamatan sinjai tengah, 1 kelurahan dan 10 desa
- d. Kecamatan sinjai selatan, 1 kelurahan dan 10 desa
- e. Kecamatan sinjai borong, 1 kelurahan dan 7 desa
- f. Kecamatan sinjai tellulimpoe, 1 kelurahan 10 desa
- g. Kecamatan sinjai bulupoddo, 7 desa
- h. Kecamatan pulau IX, 4 desa yang merupakan wilayah kepulauan.

Kabupaten sinjai juga tidak ketinggalan dengan potensi pariwisatanya. Terdapat beberapa objek wisata yang potensial untuk dikembangkan, diantaranya wilayah adat karampuang dengan pesta adat mappogau sihanua, wisata bahari dipulau larea-larea, pantai ujung kupang, hutan Mangrove tongke-tongke dan

kawasan pulau sembilan. Ada juga objek wisata sejarah seperti benteng balangnipa yang merupakan benteng peninggalan penjajah belanda dan objek wisata Batu Pake Gojeng.

Dengan potensi sumber daya yang alam yang berlimpah, memungkinkan munculnya industri-industri kecil dan industri rumah tangga. Beberapa industri yang sedang dikembangkan adalah industri gula aren, industri kerajinan bambu, industri minyak kelapa, industri pandai besi, industri pengolahan kopi, dan industri waktu senggang.



Gambar 4.1: Peta Wilayah Kabupaten Sinjai

Kecamatan sinjai timur adalah salah satu kecamatan dari sembilan kecamatan yang berada dikabupaten sinjai provinsi sulawesi selatan yang terdiri dari satu kelurahan dan Dua Belas desa, diantaranya, yaitu kelurahan Samataring, Desa Kaloling, Desa Biroro, Desa Bongki Lengkese, Desa Kampala, Desa Lasiai, Desa Panaikang, Desa Pasimarannu, Desa Pattalassang, Desa Salohe, Desa Sanjai, Desa Saukang dan Desa Tongke-tongke.



Gambar 4.2: Peta Wilayah Kecamatan Sinjai Timur

C. Kondisi Sosial - Ekonomi Kabupaten Sinjai

Secara ekonomi, daerah ini memiliki letak strategis karena memiliki dua jalur perhubungan yaitu darat dan laut. Jalur darat menghubungkan kota-kota kabupaten atau kota provinsi yang menjadi pusat kegiatan ekonomi. Sedang jalur laut di gunakan untuk hubungan antara daerah di luar provinsi sulawesi selatan.

D. Kependudukan

Jumlah dan tingkat pertumbuhan penduduk dalam wilayah perencanaan merupakan sebuah indikator yang penting untuk diketahui. Penduduk Kabupaten Sinjai hingga tahun 2016 berjumlah 239.689 dengan laju pertumbuhan penduduk 4,40 per sen selama enam tahun terakhir, terdiri dari 115.962 jiwa penduduk laki-laki dan 127.727 Jiwa penduduk perempuan. Kepadatan penduduk kabupaten sinjai adalah 292 jiwa per km². Kecamatan sinjai timur memiliki kepadatan penduduk terbesar yaitu 1.577 jiwa per km². Dari perbandingan antara golongan umur dan jenis kelamin terlihat bahwa penduduk untuk golongan umur 05-09

tahun adalah yang paling banyak jumlahnya, baik untuk jenis kelamin perempuan maupun laki-laki.

E. Agama dan Aliran Kepercayaan

Perkembangan pemeluk agama di wilayah ini tidak banyak mengalami perubahan yang berarti dan masih mengikuti laju pertumbuhan penduduk yang ada. Penduduk sebagai pemeluk agama yang terbanyak adalah Islam yaitu sebanyak 228.856 jiwa, penduduk beragama Kristen sebanyak 69 jiwa, penduduk beragama Hindu sebanyak 1 jiwa, dan beragama Budha sebanyak 6 jiwa. Berdasarkan sebaran penduduk perwilayahan pemeluk agama Islam tersebar merata di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Sinjai, sedangkan pemeluk agama Kristen hanya terdapat di Kecamatan Sinjai Utara dan Kecamatan Sinjai Barat. Sementara itu penduduk yang beragama Hindu dan Budha hanya terdapat di kecamatan Sinjai Utara, dengan jumlah yang relatif sedikit.

F. Budaya dan Adat Istiadat

Terjadinya perubahan kultur dan sosial budaya masyarakat merupakan proses transformasi global akibat tidak homogenitasnya kultur budaya pada suatu daerah. Terjadinya dinamika perkembangan perkotaan tidak lagi memandang kultur budaya dan adat istiadat sebagai hukum masyarakat (norma etika) yang berlaku, akan tetapi tergantikan oleh sifat individualistis dan kepentingan sosial ekonomi akan menjadi dominan. Perubahan proses tersebut sulit dihindari karena dipengaruhi oleh masuknya budaya lain dan perkembangan teknologi menjadi orientasi masyarakat untuk mengaktualisasikan diri. Perubahan karakter dan kultur budaya sebagai ciri khas suatu komunitas tidak perlu terjadi,

jika masyarakat memegang teguh dan menjunjung tinggi nilai budaya yang secara turun-temurun dianutnya. Salah satu kekuatan masyarakat di Kabupaten Sinjai adalah pembauran nilai religius keagamaan dalam suatu kebudayaan yang masih melekat hingga kini.

Faktor lain yang mempengaruhi adalah komunitas masyarakat di Kabupaten Sinjai sebagian besar masyarakat asli masih dalam satu ikatan rumpun keluarga, sehingga konflik sosial tidak menjadi pemisah, tetapi dapat terselesaikan secara kebersamaan dan kekeluargaan. Berdasarkan hasil pengamatan diperoleh gambaran tentang terjadinya pembauran suku dan kultur di Kabupaten Sinjai, yang secara umum dipengaruhi oleh etnis suku Bugis dengan bahasa sehari-hari yang digunakan adalah bahasa Bugis, namun disisi lain terdapat beberapa desa yang menggunakan bahasa sehari-hari yaitu Konjo.

BAB V
KONDISI MASYARAKAT DALAM MENDORONG
PELAKSANAAN P3MD

Pembangunan desa merupakan suatu proses perubahan dan cara hidup yang lebih maju dan juga merupakan suatu metode agar masyarakat pedesaan mampu membangun diri sendiri sesuai dengan kemampuan atau keterampilan yang ada dengan menggunakan sumber-sumber yang dimilikinya.

Pembangunan desa dinilai cukup menarik untuk diteliti mengingat tujuan dari bidang pembangunan desa dinyatakan dalam pasal 78 ayat (1), yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Selanjutnya dalam pelaksanaannya pembangunan desa penting untuk mengedepankan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial sebagaimana dinyatakan dalam pasal 78 ayat (3). Dalam artian pemerintah desa dan masyarakat harus mampu bersinergi dengan baik demi tercapainya asas dari pembangunan desa tersebut.

Pemerintah desa dalam menjalankan program pendampingan desa yang merupakan perwujudan dan dari demokrasi membutuhkan peran serta warga masyarakatnya untuk memberikan kritik atau masukan kepada pemerintah desa guna mendukung pemerintahan. Masukan ini akan menjadi pertimbangan pemerintah desa di dalam memutuskan atau menetapkan suatu keputusan atau peraturan sesuai dengan keinginan warga masyarakatnya, kondisi masyarakat desa

dan tercipta keselarasan, keadilan, dan kesejahteraan dalam pemerintahan desa baik pemerintah desa dan warga masyarakatnya.

Selanjutnya guna lebih menjamin terjadinya kondisi masyarakat desa yang mendorong pelaksanaan P3MD, yang berfungsi sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa, seperti yang tertera dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 112 ayat 3 juga disebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat Desa dengan:

- a. Menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa;
- b. Meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan
- c. Mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Desa.

Fungsi-fungsi inilah yang diharapkan terwujud untuk memberikan perkembangan desa di Desa Kaloling. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis pada Iktbal tenaga pendamping desa Kaloling 05 Agustus 2017, didapat penjelasan mengenai fungsi P3MD di Desa Kaloling, yaitu :

“Fungsi P3MD di Desa Kaloling berjalan dengan baik, yaitu tetap menampung aspirasi masyarakat desa dan menyalurkan aspirasi tersebut

kepada kepala desa. Penyampaian disampaikan dilakukan dengan lisan dimanapun kami bertemu. Adapun aspirasi yang disampaikan adalah jalanan tani dan jalan menuju dusun ke dusun.”

Selain bapak Ikbal, hasil wawancara dengan sekretaris Desa yaitu Bapak Amran tanggal 05 Agustus 2017, didapat penjelasan mengenai fungsi Program Pendampingan P3MD di Desa Kaloling, yaitu :

“Fungsi Pendampingan P3MD sebagai penampung aspirasi masyarakat desa kaloling melalui tenaga pendamping Desa. Namun, untuk masyarakat desa yang bertempat tinggal dekat dengan dusun tempat tinggal saya menyalurkan aspirasi langsung kepada saya. Aspirasi yang disampaikan yaitu jalanan tani dan jalan menuju dusun ke dusun.”

Mengenai fungsi pendampingan P3MD yaitu menyalurkan dan menampung aspirasi masyarakat. Adapun langkah-langkah yang diambil oleh tenaga pendamping desa Program P3MD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat desa berdasarkan wawancara dengan Bapak Ikbal selaku anggota Ketua Program Pendampingan P3MD Desa pada tanggal 05 Agustus 2017 adalah:

“Langkah yang dilakukan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat desa dengan menyampaikan kepada kepala desa pada saat diadakan rapat di Kantor desa, namun biasanya Kepala Desa tidak terlalu menanggapi aspirasi tersebut.”

Sedangkan langkah yang dilakukan oleh Bapak Amran dalam menyalurkan aspirasi tersebut, yaitu:

“Menyampaikan kepada tenaga pendamping desa Program P3MD, lalu dilakukan rapat bersama dengan aparatur pemerintahan Desa”.

Dari hasil wawancara tersebut, terdapat ketidaksesuaian dengan pendapat dari masyarakat desa itu sendiri, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Imran tanggal 06 Agustus 2017 berpendapat bahwa:

“Saya biasanya menyalurkan aspirasi langsung kepada Kepala Desa atau Kepala Dusun, hal ini dikarenakan tenaga pendamping desa Program P3MD tidak memiliki kedekatan kepada masyarakat desa dan saya juga tidak mengetahui bahwa fungsi pendampingan adalah tempat untuk menampung aspirasi.”

Hal tersebut, serupa dengan Bapak Sukri yang berpendapat bahwa selama ini aspirasi disampaikan langsung kepada Kepala Desa karena mereka tidak tahu sama sekali mengenai Program Pendampingan P3MD adalah tempat untuk menyalurkan bantuan. Selain itu, menurut mereka selama ini pun pihak pemerintahan desa tidak pernah mewadahi atau memberikan tempat bagi mereka untuk menyalurkan aspirasi.

Hal tersebut di atas menunjukkan adanya semangat pemerintah untuk melakukan demokrasi sampai ke tingkat desa. Ini memang ideal karena secara filosofis dan teoritis setiap pendampingan itu harus dilakukan pemencaran kekuasaan baik secara horizontal maupun secara vertikal dari pemerintah pusat ke daerah atau kota melalui desentralisasi dan pemberdayaan desa.

Seperti yang disampaikan oleh H. Basri selaku Kepala Desa Kaloling Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai (wawancara tanggal 06 Agustus 2017), menyatakan:

“Dalam mendorong pelaksanaan P3MD kami mengadakan rapat yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, bidan desa, semua elemen masyarakat ikut membahas rencana pembangunan desa. Namun sebelumnya diadakan pra-musyawarah ditingkat dusun untuk menampung apa-apa yang diusulkan oleh masyarakat dan untuk dibawa ketingkat desa dalam pelaksanaan P3MD”.

Pelaksanaan P3MD dianggap mendorong kinerja masyarakat desa dalam pelaksanaan pendampingan desa yang mereka anggap dapat meningkatkan taraf

hidup masyarakat desa Kaloling Kec. Sinjai Timur. Menurut pengakuan Ismail (24 tahun):

“Kalau kita lihat dari pemberdayaan masyarakat desa sebelumnya kegiatan masyarakat sangat minim dan melalui pendampingan P3MD dapat mendorong dan memotivasi masyarakat desa dalam pelaksanaan Program Pendampingan desa. (wawancara tanggal 08 Agustus 2017).”

Dari hasil wawancara di atas dengan melalui pendampingan P3MD sangat memotivasi masyarakat dalam mendukung program pemerintah desa.

BAB VI

BENTUK PENDAMPINGAN MASYARAKAT P3MD

Pendampingan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan dan dapat bermakna pembinaan, pengajaran, pengarahan dalam kelompok yang lebih berkonotasi pada menguasai, mengendalikan, dan mengontrol.

Pendampingan merupakan kegiatan untuk membantu individu maupun kelompok yang berangkat dari kebutuhan dan kemampuan kelompok yang didampingi dengan mengembangkan proses interaksi dan komunikasi dari, oleh, dan untuk anggota kelompok serta mengembangkan kesetiakawananan dan solidaritas kelompok dalam rangka tumbuhnya kesadaran sebagai manusia yang utuh, sehingga dapat berperan dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Konsep partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam mendukung pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Tanpa partisipasi dan dukungan masyarakat sangat mustahil pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat berhasil dan memiliki manfaat bagi masyarakat. Keberadaan partisipasi masyarakat sebagai syarat dalam mendukung pembangunan di daerah merupakan sebuah hal yang diharuskan di era kebebasan dan keterbukaan informasi.

Seperti yang terlihat pada masyarakat Kaloling. Bentuk pendampingan sudah menjadi bagian dari kegiatan masyarakat Kaloling. Sumber daya, diagnosis dan waktu yang disediakan dan optimalisasi partisipasi masyarakat, penetapan dan pelaksanaan pendampingan, pemantauan serta evaluasi kelestarian lingkungan

desa. Artinya masyarakat sinjai sudah dalam lingkungan yang di kembangnkn melalui program pendampingan. Padahal kalau dilihat sebelumnya, kebanyakan masyarakat sinjai lebih memilih beraktifitas sendiri, berkebun sendiri tanpa bantuan masyarakat lain.

Namun untuk lebih jelasnya bagaimana bentuk pendampingan masyarakat desa Kaloling terhadap masyarakat desa Kaloling yang dapat dilihat dari kegiatan pendampingan:

1. Inkulturasi

Tahapan awal yang dilakukan yaitu inkulturasi. Melakukan observasi langsung ke tempat tujuan dimana proses pendampingan akan dilakukan. Hal pertama yang dilakukan adalah melihat kondisi sekitar dengan memperhatikan keadaan dan kegiatan warga masyarakat. Melakukan wawancara dengan warga setempat untuk lebih banyak mencari informasi. Ikut serta dalam kegiatan warga masyarakat setempat untuk lebih mengenal kondisi lingkungan sekitar.

Setelah melakukan pendekatan dengan warga masyarakat sekitar, selanjutnya yaitu melakukan pendekatan dengan obyek yang akan dijadikan fokus penelitian dan pendampingan. Menetapkan beberapa informan untuk membantu melengkapi data-data awal.

a. Perangkat Desa

Dalam proses pendampingan lapangan tidak lepas dari dukungan perangkat desa. Salah satunya yaitu oleh kepala desa setempat. Pemberian izin lapangan tidak akan didapatkan jika tanpa persetujuan oleh Kepala Desa. Selain itu kepala desa juga berperan penting dalam mengorganisir masyarakat.

Masyarakat akan lebih mudah untuk saling membantu dan bekerja sama dengan adanya dukungan dari pemimpin desa mereka.

b. Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Jalan

Kebutuhan akan penerangan jalan yang baik tidak mungkin dapat kita abaikan. Karena penerangan jalan adalah hal yang sangat penting bagi seluruh pengguna jalan. Penerangan jalan yang dibutuhkan oleh pengguna jalan adalah penerangan yang tidak memberikan kesilauan yang berlebihan serta memperjelas pandangan, memberikan rasa aman dan nyaman ketika berkendara pada malam hari.

Penerangan jalan merupakan fasilitas umum yang harus dipenuhi oleh pemerintah melalui kebijakan dana desa pemerintah desa berusaha memenuhi kebutuhan tersebut dengan membuat dan melaksanakan program pengadaan dan pemeliharaan lampu jalan di Desa Kaloling.

Penerangan jalan merupakan fasilitas umum yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Melalui kebijakan dana desa pemerintah desa berusaha memenuhi kebutuhan tersebut dengan membuat dan melaksanakan program pengadaan dan pemeliharaan lampu jalan di Desa Kaloling.

Berikut hasil wawancara peneliti kepada bapak Salama selaku anggota masyarakat Desa Kaloling mengenai program pengadaan dan pemeliharaan lampu jalan:

“Program pengadaan lampu jalan tahun 2017 ini alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik. Lampu jalan dibangun disetiap jalan di Sampulungan. ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan penerangan jalan yang telah lama diinginkan. Dengan dibangunnya lampu jalan ini masyarakat desa menyambut dengan gembira”. (wawancara pada tanggal 09 2017).

Bapak Ilham pun menyatakan hal demikian seperti berikut ini :

“iya Alhamdulillah sudah ada lampu jalan sekarang disini. Sekarang sudah terang kalau jalan kaki dimalam hari. Dulu kan memang tidak ada lampu jalan, baru sekarang teralisasi. Saya pribadi gembira dengan adanya lampu jalan ini dan saya rasa warga lainpun sama.”(wawancara pada tanggal 09 Agustus 2017).

Dari hasil wawancara diatas terlihat bahwa warga Kaloling menyambut gembira adanya lampu jalan sebagai penerangan dimalam hari. Sebab dahulu memang belum ada sehingga sangat gelap jika malam hari. Para pejalan kaki tentu merasa tidak nyaman jika jalan yang dilalui sangat gelap. Namun sekarang kebutuhan akan penerangan jalan telah terpenuhi. Warga desa dapat menikmati terangnya jalan saat berjalan kaki atau beraktivitas lainnya di malam hari. Selanjutnya bagaimana pemerintah dan warga desa memelihara fasilitas umum tersebut sebab segala kemungkinan kerusakan dan lainnya dapat terjadi.

Seperti yang dikatakan oleh bapak H. Basri berikut ini :

“Cuma kadang lampunya itu cepat putus karena terkena angin atau kejatuhan ranting pohon yang berada disekitar tiang lampu jalan. Inilah yang harus menjadi perhatian masyarakat agar terus memperhatikan dan memelihara fasilitas yang telah disediakan. Jika melihat atau mendapati lampu yang rusak segera melapor ke pemerintah desa agar lampu yang rusak segera mendapat perbaikan.”(wawancara pada tanggal 09 Agustus 2017).

Dari pernyataan diatas terlihat bahwa masih ada beberapa masalah pada lampu jalan yang kadang rusak karena terpaan angin atau karena terkena jatuhnya ranting pohon yang berada di sekitar tiang lampu jalan tersebut. Dan disarankan agar warga desa yang melihat saat rusaknya lampu jalan tersebut melapor kepada aparat pemerintah agar segera mendapat perbaikan. Inilah yang diharapkan

pemerintah desa sebagai penyedia fasilitas umum, agar masyarakat dapat menikmati dan memeliharanya.

Program pengadaan dan pemeliharaan lampu jalan telah terealisasi dan bermanfaat bagi masyarakat desa. Berdasarkan hasil observasi penulis, ternyata lampu jalan ini tidak memiliki tiang sendiri melainkan menumpang pada tiang listrik. Jadi lampu jalan yang terpasang mengikuti tiang listrik dengan jarak kurang lebih 100 meter. Sekdes Kaloling memberikan konfirmasi tentang hal itu yang mengatakan bahwa pengadaan lampu jalan yang hanya dianggarkan sebesar Rp. 25.000.000,- tidak cukup untuk pengadaan tiang pula mengingat harga tiang yang berkualitas cukup tinggi. Selain itu tingginya tagihan pajak menjadi pertimbangan dalam hal ini.

Meskipun lampu jalan menumpang pada tiang listrik tetapi tidak mempengaruhi fungsi dan manfaatnya bagi masyarakat desa. Masyarakat tetap dapat menikmati penerangan jalan di malam hari.

c. Pembangunan Drainase

Drainase adalah pembuangan massa air secara alami atau buatan dari permukaan atau bawah permukaan dari suatu tempat. Saluran drainase permukaan biasanya berupa parit yang dibangun dengan kokoh agar dapat berfungsi dengan baik. Beberapa manfaat drainase adalah untuk mengalirkan resapan air hujan dalam lingkungan warga menuju ke badan sungai, lingkungan dapat lebih rapi, tidak becek dan banjir, serta untuk memperbaiki tata ruang desa. Namun yang paling sering dirasakan yaitu untuk mencegah banjir karena saluran air dapat dilancarkan dengan adanya drainase ini.

Di Desa Kaloling juga memprogramkan pembangunan drainase di beberapa titik yang berpotensi terkena genangan air ketika musim hujan tiba.

Berikut pendapat Salama mengenai pembangunan drainase:

“benar ada pembangunan drainase di Kaloling tepatnya didusun Kaloling Beru. Disana ada wilayah yang memang rawan banjir bila musim hujan tiba. Rumah warga tergenang dan tidak mungkin juga tidak mempengaruhi jalan disitu.”(wawancara pada tanggal 09 Agustus 2017).

Pendapat dari warga tersebut dibenarkan oleh bapak Amran selaku sekdes

Kaloling seperti berikut ini:

“salah satu program yang diusulkan lagi tahun 2017 adalah pembangunan drainase. Dan telah direalisasikan di Dusun Kaloling, drainase dibangun disana untuk membantu mengurangi bahkan mengatasi bencana banjir bila musim hujan tiba.”(wawancara pada tanggal 09 Agustus 2017)

Salah seorang warga bernama Sukri juga memberikan sambutan gembira dengan dibangunnya drainase:

“selain itu drainase juga lingkungan lebih rapi dan mencegah banjir. Saya merasa senang dengan adanya drainase dilingkungan karena merasa warga kecil ikut dilibatkan dalam pembangunan, pemeliharaan dan merasa diperhatikan.”(wawancara pada tanggal 09 Agustus 2017).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa respon masyarakat sangat baik menerima realisasi program pembangunan drainase. Selain untuk mengatasi banjir yang sering terjadi di wilayah juga bermanfaat untuk perbaikan wilayah dan merapikan pemukiman warga dalam artian tidak becek disekitar pemukiman Bapak Kepala Desa dan Sekdes juga mengatakan hal demikian mengenai manfaat dibangunnya drainase di dusun Kaloling.

“pembangunan drainase di Kaloling memberi dampak baik untuk pemukiman disana. Dulu pemukiman disana rawan banjir dan sangat becek, bahkan bisa dikatakan kumuh. Tapi sekarang sudah jauh lebih baik, aliran air lancar dan tidak menggenangi rumah warga meskipun

musim hujan. Warga disana sangat bersyukur dengan adanya pembangunan drainase.”(wawancara pada tanggal 09 Agustus 2017).

Terlihat bahwa dengan adanya drainase yang dibangun sekitar pemukiman warga rawan banjir sangat membantu untuk menuntaskan masalah banjir. Terbukti dengan tidak tergenangnya lagi pemukiman warga ketika musim hujan tiba. Saluran air lancar dan pemukiman warga menjadi lebih rapi dan bersih karena tidak lagi becek dan berlumpur seperti sebelumnya. Kemudian manfaat lainnya yaitu memberikan kesempatan kepada warga untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan drainase ini. warga ikut mengerjakan kegiatan ini, sehingga mereka merasa dilibatkan dalam setiap kegiatan pemerintah. Hal ini memberikan nilai positif tersendiri bagi warga desa.

d. Perintisan Jalan Tani

Perintisan jalan Tani di area persawahan desa Kaloling merupakan salah satu program yang direalisasikan pemerintah desa pada tahun 2017. Perintisan jalan Tani bertujuan untuk mempermudah akses warga menuju area persawahan dan sebaliknya serta mempermudah pengangkutan hasil tani.

Berikut kutipan wawancara kepada salah seorang petani bernama Salama mengenai perintisan jalan baru yang dilaksanakan di desanya.

“salah satu program dari dana desa tahun anggaran 2017 adalah pembuatan jalan tani di beberapa titik, termasuk di sekitar lahan saya. Dan alhamdulillah program ini sudah terlaksana dengan cukup baik bagi saya dan telah memberi manfaat bagi saya maupun petani lain. Adanya jalan tani ini sangat membantu petani untuk mempermudah akses keluar masuk area persawahan. Khususnya saat musim panen yang dahulunya sangat sulit bagi kami membawa keluar sendiri hasil panen padi dari area persawahan kini tidak lagi. Mobil milik pengepul padi bias langsung menjemput hasil panen petani di depan sawah termasuk saya sendiri.”(wawancara pada tanggal 09 Agustus 2017).

Dengan pendapat yang sama salah seorang anggota masyarakat desa Kaloling bernama Sukri mengungkapkan bahwa :

“warga desa sangat terbantu dengan adanya dana desa ini sebagai salah satu bukti konkrit adalah program pembangunan jalan tani (perintisan jalan baru) yang sangat bermanfaat bagi petani dan pengguna jalan lainnya. Seperti saat panen padi dahulu petani harus bersusah payah mengeluarkan hasil panennya dari sawah menuju jalan yang bisa dilalui mobil. Namun saat ini pengepul hasil panen padi dapat dengan mudah menjemput hasil panen petani di sawah.”(wawancara pada tanggal 09 Agustus 2017).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa program perintisan jalan Tani telah terealisasi dengan baik. Warga desa juga telah menikmati perbedaan sebelum dan sesudah adanya jalan baru tersebut.

Tercapainya suatu perencanaan tidak lepas dari kendala-kendala yang muncul. Dalam pelaksanaan program ini ada beberapa kendala yang kadang menghambat terlaksananya kegiatan. Berikut kutipan wawancara dengan sekdes Kaloling

“kendala-kendala itu jelas ada, apalagi ini menyangkut hak milik orang. Ada beberapa orang yang tidak memberikan izin bila lahannya dijadikan jalan. Padahal kami hanya meminta sedikit saja sekitar 1-2 meter saja, inipun untuk mereka juga. Tapi apa mau dikata jika tidak diizinkan oleh pemiliknya. Jadi di beberapa titik yang telah kami rencanakan pun tidak dapat terlaksana karena kendala tersebut. Agar dana tetap dapat berjalan maka kami mengalihkan dana tersebut untuk pembangunan yang lainnya.”(wawancara pada tanggal 09 Agustus 2017).

Bapak Sukri selaku anggota masyarakat Kaloling membenarkan perkataan bapak sekdes diatas.

“iya memang ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini, salah satunya itu masalah pembebasan lahan yang terkadang ada pemilik lahan yang tidak mengizinkan lahannya digunakan untuk jalan. Ini masalah terberat ketika akan melaksanakan kegiatan tetapi terhambat karena masalah izin. Jika sudah berusaha tapi tetap diizinkan ya kami

mengalihkan biaya program ini untuk program dan kegiatan yang lain menyangkut pembangunan.”(wawancara pada tanggal 09 Agustus 2017)

Dari hasil wawancara diatas terlihat bahwa salah satu permasalahan yang muncul adalah masalah pembebasan lahan yang kadang tidak mendapat izin dari pemilik lahan. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan waktu pelaksanaan dari yang telah direncanakan. Jika tidak segera dialihkan maka dana untuk pembiayaan program ini akan mandeg yang akan berdampak pada penerimaan dana periode selanjutnya. Oleh karena itu dengan cepat pemerintah desa mengambil keputusan untuk mengalihkan pembiayaan ke program yang lain.

Tingginya harga tanah menjadi penyebab sulitnya warga memberikan sedikit tanahnya untuk dijadikan jalan baru. Kemudian yang menjadi kesulitan bagi pengelola dana karena tidak adanya anggaran untuk pembebasan lahan. Inilah yang menjadi kendala utama untuk program perintisan jalan baru. Namun beigtu di tahun 2017 Pemerintah desa Kaloling berhasil melaksanakan program perintisan jalan baru di dua titik sekaligus yakni di Desa Kaloling dan langsung dengan bangunan jalan paving block.

e. Pembangunan Jalan Paving Block

Paving block adalah batu cetak yang berasal dari campuran bahan bangunan berupa pasir dan semen PC. Sedangkan jalan paving blok adalah jalan yang terbuat dari susunan batu paving blok. Jalan paving blok dinilai cukup cocok untuk wilayah desa Kaloling karena pemasangannya mudah bahkan tidak perlu keahlian khusus, bisa diproduksi secara massal, mudah pemeliharaannya karena dapat dibongkar pasang kembali, permukaannya berpori sehingga mengurangi genangan di permukaan dan memudahkan peresapan kedalam serta

tahan terhadap beban baik vertikal maupun horizontal. Oleh karena itu jalan paving blok tersebut harus tergolong kuat agar dapat digunakan dalam jangka lama dan tidak gampang hancur. Kunci kekuatannya adalah kualitas bahan serta cara pemasangan paving blok dengan cara dan teknik yang benar akan memaksimalkan kekuatan dari jalan apalagi yang sering dilalui kendaraan.

Salah satu program di bidang Pendampingan Masyarakat Desa Kaloling adalah pembangunan jalan paving block. Untuk tahun 2017 pembangunan jalan paving block dilakukan di 11 titik dengan rincian 4 titik di Dusun Kaloliling, 4 titik di dusun Bainang dan 3 titik di dusun Bilalang. Pembangunan jalan paving block di desa Kaloling ini berfokus pada lorong-lorong desa. Berikut kutipan wawancara yang dilakukan dengan seorang warga Kaloling yang bernama Sukri Seperti berikut ini:

“salah satu program dana desa yang saya ketahui adalah program pembangunan jalan. Saya sudah merasakan manfaatnya, yang dulunya jalanan rusak, berlubang dan sulit untuk dilewati sekarang sudah bisa dinikmati sendiri. Jalanan sudah bagus dan tidak bergelombang parah seperti dulu. Belum lagi becek kalau musim hujan. (wawancara pada tanggal 09 Agustus 2017)

Hal tersebut sejalan dengan dengan yang dikatakan oleh Sekertaris Desa Kalolling seperti berikut ini :

“Sekarang sebagian besar jalanan di Desa Kaloling sudah lumayan lebih baik dibanding dahulu sebelum adanya dana desa. Dulu disini sangat sepi bahkan tidak ada penjual keliling masuk di lorong- lorong kampung ini. tapi sekarang sudah ramai karena sudah banyak penjual keliling masuk kampung.”(wawancara pada tanggal 09 Agustus 2017)

Kepala Desa Kaloling juga menegaskan bahwa pembangunan jalan paving block ini memang sangat bermanfaat bagi warganya.

“ada satu titik pembangunan jalan paving blok itu di dusun Kaloling. Dulu sebelum dibangun paving, jalannya sangat rusak, becek dan tergenang air sehingga tidak bisa di lalui kendaraan. Bahkan ada warga yang terpaksa membuat pagar di sekitar pekarangan rumahnya karena dijadikan jalan oleh pengguna jalan disitu. Setelah jalan paving selesai dikerjakan warga sekitar sangat bersyukur karena fungsi jalan telah dirasakan kembali.” (wawancara pada 09 Agustus)

Dari kutipan hasil wawancara diatas membuktikan bahwa pembangunan jalan memang menjadi prioritas di desa Kaloling. sebab kondisi jalan yang sangat tidak baik untuk dilalui oleh pengguna jalan. Oleh karena itu, tahun 2017 saja pembangunan jalan paving dilakukan hingga pada 11 titik. Dan sekarang masyarakat desa telah merasakan kembali jalanan yang baik dan layak.

Masyarakat layak mendapatkan apa yang menjadi haknya termasuk fasilitas umum seperti jalan. Melalui program-program dari dana desa pemerintah desa telah mengupayakan agar fasilitas umum yang layak dapat digunakan dan dinikmati masyarakat desa tanpa terkecuali. Kini masyarakat telah menikmati fasilitas tersebut.

f. Pemeliharaan Lapangan Sepak Bola

Lapangan olahraga sebagai salah satu sarana dan prasarana olahraga yang harus ada di desa. Karena desa merupakan tempat lahirnya bibit-bibit atlet potensial. Selain untuk kepentingan olahraga, lapangan desa juga memiliki manfaat untuk perkembangan ekonomi, sarana untuk menggali potensi pemuda di desa, dan terutama untuk menjadi alat perekat persatuan dan kesatuan masyarakat.

Sebagai bentuk pemeliharaan lapangan sepak bola di desa Kaloling, pemerintah desa Kaloling mengalokasikan dana untuk itu sebesar Rp.

10.000.000,-. Dana tersebut digunakan untuk membuat lapangan takraw yang berada di salah satu bagian sudut lapangan sepak bola.

Dulunya tempat itu sangat kotor dan mengeluarkan bau tak sedap karena digunakan sebagai tempat pembuangan sampah oleh warga. Semua jenis sampah dibuang di tempat itu sehingga mengganggu kenyamanan warga sekitar lapangan. Oleh karena itu di ubahlah tempat pembuangan sampah tersebut menjadi lapangan takraw yang dibuat dengan lantai paving block yang multi fungsi.

Lapangan takraw yang multifungsi karena tidak hanya digunakan untuk bermain takraw saja. Ketika malam hari ada yang menggunakannya sebagai lapangan bulutangkis dan ketika siang digunakan warga untuk menjemur hasil panen padi warga. Berikut penuturan sekertasris desa Kaloling terkait pembangunan lapangan takraw di sekitar lapangan sepak bola.

“salah satu bentuk pemeliharaan lapangan sepak bola disini adalah pembangunan lapangan sepak takraw di sudut lapangan sepak bola. Ini dimaksudkan untuk mensterilkan lapangan dari sampah-sampah. Dulu warga membuang semua jenis sampah disitu, akhirnya menumpuk dan menyebabkan bau tak sedap. Karena itu kami berupaya bagaimana agar supaya tidak terjadi terus menerus. Dan itulah pembangunan lapangan takraw yang multifungsi. Warga dapat bermain takraw di sore hari, ketika malam ada yang menggunakannya untuk bermain bulutangkis dan siang harinya digunakan warga untuk menjemur hasil panen padinya. Sehingga berdampak pula pada kebersihan lapangan sepak bola.”(wawancara pada tanggal 09 Agustus)

Di desa Kaloling terdapat satu lapangan sepak bola yang terletak tepat di depan kantor desa Kaloling. kondisi lapangan yang masih cukup layak untuk digunakan untuk berbagai kegiatan tak hanya bermain sepak bola saja. Berikut

penuturan salah seorang warga bernama Akbar mengenai program pemeliharaan lapangan tersebut.

“kondisi lapangan sepak bola disini lumayan baik, meskipun masih jauh dari kata baik tapi setidaknya bisa digunakan untuk bermain dan berolahraga para pemuda disini. Untuk pemeliharaannya biasanya dilakukan gotong royong paling tidak seminggu satu kali untuk memangkas rumput dilapangan.”(wawancara pada tanggal 09 Agustus).

Penuturan warga diatas ditambahkan oleh bapak Sukri mengenai gotong royong untuk pembersihan lapangan sepak bola.

“gotong royong untuk pembersihan lapangan biasanya dilakukan setiap hari minggu dan keseringan itu pada pagi hari. Seluruh masyarakat dipanggil untuk berpartisipasi dalam gotong royong ini, tapi yang datang kebanyakan para pemain bola, pemuda dan aparat desa. Yah tidak bisa juga berharap lebih karena warga juga punya rutinitas lain, jadi kalau ada yang bisa menyempatkan waktunya untuk gotong royong kami sangat berterima kasih.”(wawancara pada tanggal 09 Agustus)

Kepala Desa juga membenarkan kegiatan gotong royong untuk pembersihan lapangan sebagai salah satu bentuk pemeliharannya.

“Lapangan sepak bola itu dibersihkan paling tidak seminggu satu kali atau melihat kondisi lapangan juga. Semua dipanggil untuk melakukan gotong royong tapi yang sering berpartisipasi itu para pemuda dan aparat desa saja. Warga lain mungkin sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Sebenarnya kehadiran lapangan ini cukup menjadi pemenuh kebutuhan untuk desa. Lapangan bisa digunakan untuk kegiatan apapun.”(wawancara pada 09 Agustus)

Dari kutipan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa program pemeliharaan lapangan sepak bola dilakukan dengan cara bergotong royong yang harusnya diikuti oleh seluruh warga. Namun kenyataannya masih banyak warga yang belum bisa berpartisipasi dalam kegiatan ini karena kesibukan pekerjaan.

Bagi sebagian orang yang gemar berolahraga tentu kehadiran lapangan yang layak digunakan menjadi suatu kebutuhan yang memang harus dipenuhi

oleh pemerintah desa. Jika lapangan sudah tersedia, maka pemerintah bersama masyarakat memiliki kewajiban yang sama untuk memelihara fasilitas umum dan sarana olahraga tersebut. Namun pada kenyataannya budaya gotong royong mulai luntur dikalangan masyarakat saat ini. Kebersamaan, persatuan, dan rela berkorban yang merupakan bagian dari nilai-nilai pancasila tak lagi melekat erat dikalangan masyarakat saat ini.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, seluruh program yang disepakati dalam Musrenbang dan menjadi RKP-Desa Kaloling telah terealisasi. Masyarakat telah menikmati output dari program pembangunan ini. Program-program yang dibuat oleh pemerintah desa merupakan aspirasi dari warga desa yang memang kebutuhan mendesak bagi desa itu sendiri. Sejauh ini program yang telah di realisasikan tersebut dinilai dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, yang merupakan salah satu tujuan dari pembangunan desa ini. Dan yang paling besar manfaatnya bagi warga desa adalah pembuatan jalan tani, perintisan jalan baru dan perbaikan jalan paving block di lorong-lorong. Paling tidak saran dan prasarana umum seperti jalanan merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat untuk mempermudah segala akses yang dibutuhkan warga desa.

Selain itu, pemerintah desa sangat mengupayakan penggunaan dana desa untuk Pendampingan Masyarakat Desa agar selalu melibatkan masyarakat desa. Sebab dalam pelaksanaan setiap bidang program diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja masyarakat setempat. Seperti, memberikan

proyek pelaksanaan kegiatan kepada warga lokal sehingga pekerjaanya pun dari dalam desa saja. Selain itu, bermitra dengan beberapa toko lokal sebagai penyedia bahan-bahan untuk memenuhi keperluan proyek. Hal ini dilakukan agar dana tersebut tetap memberi manfaat untuk warga desa sebagai bentuk kerjasama pemerintah desa dengan warga desa dan upaya peningkatan pendapatan warganya. Seperti yang dikatakan oleh salah seorang warga yang bernama Muktar sebagai penyedia bahan- bahan bangunan seperti semen, pasir dan lain- lain :

“dalam pembangunan beberapa program disini, saya membantu menyediakan bahan-bahan bangunan yang diperlukan seperti pasir dan batu paving. Bahan-bahan yang tidak tersedia didalam desa saya ambilkan di desa sebelah.”(wawancara pada tanggal 09 Agustus 2017)

Hal tersebut dibenarkan oleh sekertaris Desa Kaloling yang mengatakan bahwa :

“kami pemerintah desa sebagai pengelola dana desa sangat berupaya bagaimana agar dana tersebut dapat dirasakan manfaatnya dengan keterlibatan seluruh elemen masyarakat desa. Kami berusaha agar dana hanya berputar-putar di desa saja. Seperti penyediaan bahan-bahan bangunan kami bekerjasama dengan warga yang memiliki jaringan dengan penyedia bahan yang dibutuhkan.”(wawancara pada tanggal 09 Agustus 2017)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa telah berupaya untuk memanfaatkan dana desa dengan sebaik mungkin untuk penyediaan bahan-bahan dalam pendampingan masyarakat desa Kaloling dan juga melibatkan warga desa. Dalam hal ini pemerintah dan masyarakat merupakan mitra kerja dalam misi penyelesaian program pembangunan desa untuk kesejahteraan bersama.

Kemudian dalam hal sewa kelola diatas pemerintah desa juga berupaya agar proyek-proyek pembangunan di desa di laksanakan oleh warga lokal. Dengan maksud dan tujuan agar dana yang digunakan untuk Pendampingan Masyarakat desa ini tetap bermanfaat dan berputar di dalam desa saja. Seperti yang dikatakan oleh bapak Sekdes berikut ini :

“iya memang benar warga disini juga dilibatkan dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang di programkan desa. Pelibatan tersebut melalui kerja borongan yang diberikan kepada warga lokal. Karena warga disini sebagian besar memiliki kemampuan yang cukup baik dalam hal kerja bangunan, sehingga tidak ragu bagi kami untuk memberikan proyek-proyek dalam desa kepada warga lokal. Mengingat program dari dana desa ini memang harus dilaksanakan secara swakelola”.(wawancara pada tanggal 09 Agustus 2017)

Penuturan bapak Sekdes diatas dibenarkan oleh bapak Sukri, benar bahwa dalam program dari dana desa pemerintah desa berupaya agar masyarakat terlibat penuh dalam setiap pelaksanaan kegiatan.

“dana desa ini memang untuk masyarakat desa, jadi sebagai pengelola kita harus benar-benar dalam mengelolanya. Bagaimanapun bentuknya masyarakat harus bisa menikmati kucuran dana desa ini. Seperti dalam kegiatan pembangunan jalan, drainase dan pembangunan sarana prasarana lainnya, pemerintah desa mengambil pekerja lokal untuk mengerjakannya. Ini adalah salah satu upaya pemerintah desa untuk sedikit membantu perekonomian warganya. Dan juga banyak warga yang memiliki keahlian dalam pekerjaan itu, jadi bisa dipercaya untuk dapat menyelesaikan proyek dengan baik”.(wawancara pada tanggal 09 Agustus 2017).

Salah seorang warga bernama Amir yang terlibat dalam pengerjaan tersebut juga memberikan keterangan seperti berikut ini:

“saya ikut dalam salah satu kegiatan pembangunan sarana dan prasarana ini. Saya ikut serta dalam pembuatan jalan paving block. Lumayan lah menambah penghasilan. karena pekerjaan saya tidak tetap jadi dengan ini saya merasa cukup terbantu. Saya memang sering ikut menjadi kuli bangunan diluar desa jadi masih ada biaya tambahan, kalau ini

didalam kampung saat jam istirahat saya bisa pulang kerumah untuk makan siang dan tidak perlu lagi isi bensin setiap hari.”(wawancara pada tanggal 09 Agustus 2017).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa program pembangunan ini melibatkan masyarakat. Dan dapat dinilai cukup efektif untuk membantu warga desa. Meskipun tidak secara langsung menghasilkan output seperti barang dan jasa, namun ini membantu perekonomian warga yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Selain itu masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan dana desa di Sampulungan, seperti yang dikatakan oleh bapak Amir beliau berpendapat bahwa:

“dalam hal Pendampingan Masyarakat Desa sudah terlaksana cukup baik, namun masih ada yang kurang yakni bagi yang berprofesi sebagai pedagang seperti saya belum ada bantuan yang signifikan. Mungkin melalui pembangunan jalan iya cukup menambah pendapatan perhari karena jalanan bagus dan banyak dilalui orang”.(wawancara pada tanggal 16 Februari 2017)

Dalam hal ini tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa telah dilaksanakan dalam program Pendampingan Masyarakat Desa Kaloling. Dari beberapa hasil wawancara tersebut warga desa sudah merasakan manfaat dari program-program Pendampingan Masyarakat Desa. Meskipun belum semua sektor yang ada di Desa Kaloling, namun sudah cukup memberi dampak positif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Secara umum program-program yang telah terealisasi lebih berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan sedikit berperan dalam penanggulangan kemiskinan. Melalui kegiatan-kegiatan yang mengikutsertakan peran masyarakat sebagai pekerja bangunan sedikit banyak telah membantu

perekonomian warganya. Melalui program pembangunan infrastruktur sebagai bentuk perbaikan sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan termasuk ketahanan pangan dan pemukiman. Hal ini sudah cukup terlihat pada keadaan perekonomian warga desa Kaloling.

Dari seluruh program yang telah terealisasi tidak terlihat program khusus yang mengarah pada peningkatan kualitas hidup manusia. Namun melalui Pendampingan Masyarakat Desa seperti perbaikan jalan tentu memberi dampak bagi seluruh lapisan masyarakat. Kondisi jalan yang baik tentu akan mempermudah anak-anak warga untuk menuju kesekolahnya dengan tepat waktu. Selain itu, kondisi lapangan yang baik dan memadai dapat meningkatkan potensi bidang keolahragaan yang dimiliki desa seperti sepak bola, bulutangkis, takraw dan sebagainya.

Selanjutnya kondisi jalan yang baik serta adanya pembangunan talud pada sektor pertanian yang tidak lain merupakan salah satu sumber pendapatan warga desa Kaloling adanya jalan tani dapat memudahkan para petani mengangkut hasil panennya, hal ini berdampak pada peningkatan pendapatan warga. Kemudian adanya drainase di pemukiman rawan banjir kini menjadikan pemukiman tersebut bebas dari banjir dan jauh lebih bersih. Kemudian dengan pengerjaan program secara swakelola memberikan kesempatan kepada warga untuk berpartisipasi aktif dan ikut serta untuk menambah penghasilannya. Hal ini sangat bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang berdampak pula untuk menanggulangi kemiskinan yang ada.

Melalui pembangunan infrastruktur, perbaikan sarana dan prasarana umum dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan bahkan mengurangi angka kemiskinan. Penggunaan dana desa yang tepat sasaran akan mempermudah tercapainya tujuan. Oleh karena itu pemerintah desa sebagai pengelola dana desa bersama masyarakat sebagai sasaran dan pengawas kegiatan harus mampu bersinergi dengan baik demi tercapainya tujuan pembangunan desa.

BAB VII

DAMPAK SOSIAL P3MD TERHADAP PENDAMPINGAN MASYARAKAT

Pendekatan secara sosiologis dapat menjadikan konsep sebagai dasar untuk menelaah sebuah gejala sosial, yang kemudian dampak sosial merupakan sebuah efek dari sebuah fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Dalam kehidupan sosial ada berbagai macam konsep sosiologi seperti interaksi sosial, kelompok sosial, lembaga sosial, lapisan sosial, perubahan sosial dan lain sebagainya. Dari berbagai macam konsep tersebut ada sebuah dinamisasi atau perubahan yang terjadi pada individu, kelompok ataupun masyarakat seperti yang dikemukakan salah Sekdes Desa Kaloling bahwa:

“Apabila tidak pernah berkomunikasi maka seluruh kegiatan masyarakat tidak dapat terealisasi dan bahkan masyarakat tidak dapat berbicara dengan sesamanya, maka dari harusnya kita tetap menjaga interaksi sosial kepada sesama dengan mendirikan kelompok-kelompok dan lembaga sosial yang dapat menjadikan sarana dan prasarana bagi kita semua di sini. (Wawancara 10 Agustus 2017).

Kegiatan sosial yang dimaksud hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa betapa pedulinya masyarakat Desa Kaloling agar dapat ikut serta mensejahterakan dan mensukseskan program pendampingan pemerintah desa.

Semangat proaktif yang menjalin hubungan dengan masyarakat lainnya yang saling memberi dan menerima, saling percaya mempercayai dan diperkuat oleh nilai-nilai norma yang mendukungnya. Kemudian dampak sosial dikemukakan oleh beberapa ahli:

1. Trust (saling percaya)

Komponen penting dari adanya masyarakat adalah saling percaya antar sesama. Saling percaya muncul tidak dengan tiba-tiba. Tetapi akan muncul manakala para anggota masyarakat sudah saling menghargai dan saling jujur. Intinya menghargai dan saling jujur, yang kemudian di larang berbohong, merendahkan orang lain, mencaci, memaki.

Organisasi sosial melalui saling percaya dan sudah saling menghargai dan saling jujur maka pasti akan muncul saling percaya atau *trust*. Salama, anggota Masyarakat Desa Kalolling berpendapat bahwa:

”Sangat bagus kalau ada rasa jujur dalam berkomunikasi, beriteraksi, berbagi, tolong menolong, serta menjunjung tinggi rasa kemanusiaan dalam bertetangga, bermasyarakat dan bernegara. (Wawancara 10 Agustus 2017).

Maksud dari percakapan di atas yaitu selaku masyarakat ditekankan bahwa bertetangga, kehidupan adalah sebuah tindakan nyata untuk dilakukan oleh masyarakat yang kemudian dapat saling tolong menolong dan saling percaya serta saling menghargai.

Dampak sosial adalah suatu kajian yang dilakukan terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat sebagai akibat dari pelaksanaan suatu kegiatan pembangunan di suatu wilayah atau area. Kajian dilakukan untuk menelaah dan menganalisa berbagai dampak yang terjadi baik positif maupun negatif dari setiap tahapan kegiatan mulai dari tahap pra konstruksi, konstruksi, sampai tahap operasi.

Dampak sosial sebagai pengaruh penting bagi para individu dan dapat sangat mempengaruhi kemampuan mereka untuk bertindak dan kualitas

kehidupan yang mereka rasakan. Masih dalam bukuyang sama, Coleman (hal. 420) menggambarkan bahwa dampak sosial memudahkan pencapaian tujuan yang tidak dapat dicapai tanpa keberadaannya atau dapat dicapai hanya dengan perubahan social yang lebih tinggi”.

Hal demikian itu dikemukakan oleh salah satu tokoh masyarakat di Desa Kaloling bahwa:

“Berpengaruh sekali kemampuan seseorang terhadap individu dalam bertindak dan melakukan sesuatu hal yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat desa. (Wawancara 10 Agustus 2017).

Maksud dari pembicaraan warga di atas menunjukkan bahwa masih ada kesadaran dan kesetiaan dalam mendukung pembangunan desa bersama-sama. Keterampilan dan pengetahuan yang ditunjukkan oleh seseorang atau sekelompok orang merupakan perwujudan sikap manusia. Demikian pula halnya dampak sosial karena diwujudkan dalam relasi di antara orang-orang.

Dampak sosial sebagai kemampuan masyarakat untuk melakukan asosiasi yang (berhubungan) dengan satu sama lain dan selanjutnya menjadi kekuatan yang sangat penting, bukan hanya bagi kekuatan ekonomi tetapi juga pada setiap aspek eksistensi sosial yang lain.

2. Norma

Perilaku bagi individu dan apa yang mesti mereka lakukan dalam menjaga eksistensinya jika mereka memiliki norma yang berlaku dan disepakati bersama, apabila tidak ada maka tidak ada masyarakat melainkan hanya sekumpulan data.

Program pembangunan pertanian, merupakan program untuk meningkatkan output dan pendapatan para petani. Juga untuk menjawab

keterbatasan pangan di pedesaan, bahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar industri kecil dan kerumahtanggaan, serta untuk memenuhi kebutuhan ekspor produk pertanian bagi negara maju. Program industrialisasi pedesaan, tujuan utamanya untuk mengembangkan industri kecil dan kerajinan. Pengembangan industrialisasi pedesaan merupakan alternative menjawab persoalan semakin sempitnya rata-rata pemilikan dan penguasaan lahan dan lapangan kerja dipedesaan.

BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai efektivitas penggunaan dana desa dalam pelaksanaan program bidang pembangunan desa di desa Kaloling Kecamatan Sinjai Timur Tahun 2017 dapat diukur dengan menggunakan pendekatan sasaran (*goal approach*) yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis (1987) dengan melihat output kegiatan yaitu realisasi program dan kemanfaatan program tergolong sudah sangat efektif. Berikut uraian singkat sebagai pendukung dari kesimpulan peneliti.

1. Respon Masyarakat

Pelaksanaan program dibidang Pendampingan Masyarakat Desa di desa Kaloling Kec. Sinjai Timur dilihat dari jumlah program yang direncanakan pada tahun 2017 sebagian besar telah terealisasi dengan baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa realisasi program berjalan dengan sangat efektif. Karena seluruh program dapat terealisasi dengan baik. Meskipun masih terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya namun seluruh program dapat direalisasikan dengan baik.

Kendala-kendala tersebut diantaranya pembebasan lahan untuk perintisan jalan baru. Ada beberapa warga yang tidak mengizinkan tanahnya untuk dijadikan jalanan umum, sehingga menyebabkan terhambatnya realisasi program tersebut. Ditambah lagi tidak adanya anggaran untuk pembebasan lahan

sehingga pemerintah desa terkadang kesulitan saat melobi warga. Selebihnya program lain tidak memiliki kendala berarti.

Kemudian masyarakat desa juga diberi kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam penggunaan dana desa mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban atas pembangunan yang telah dilaksanakan. Pemerintah desa sepenuhnya mengambil tenaga kerja lokal untuk menyelesaikan kegiatan pembangunan. Tak hanya pekerja lokal tetapi pemerintah desa juga bekerja sama dengan supplier lokal untuk menyediakan bahan-bahan bangunan dengan harga wajar.

2. Bentuk Pendampingan

Dari segi kemanfaatannya untuk masyarakat desa sebagai sasaran dari pelaksanaan program Pendampingan Masyarakat Desa ini sudah sangat efektif dengan melihat hasil wawancara. Terutama pada program pembangunan jalan paving block yang sangat berdampak bagi masyarakat. Sebagian besar masyarakat sangat bersyukur adanya pembangunan jalan paving block di lorong-lorong, karena dahulu sebagian besar jalan dilorong dalam kondisi kurang baik atau rusak. Kemudian perintisan jalan baru yang disebut juga dengan jalan tani karena jalan baru ini memang untuk menunjang dan mempermudah aktivitas bertani warga.

Kemudian pembangunan drainase di sekitar pemukiman warga yang rawan banjir, kini pemukiman warga tersebut tidak tergenang air walau musim hujan. Adanya drainase ini menyulap pemukiman yang sedikit kumuh menjadi jauh lebih rapi dan bersih karena lancarnya saluran air.

Program pengadaan dan pemeliharaan lampu jalan di desa Kaloling juga telah terlaksana dengan baik. Masyarakat desa dapat menikmati penerangan di jalan ketika malam hari. Selanjutnya adalah program pemeliharaan lapangan sepak bola yang berfokus pada bagian lapangan yang digunakan sebagai pembuangan sampah oleh warga. Melihat kondisi tersebut pemerintah desa berinisiatif untuk membuat lapangan takraw dibagian tersebut. Dan akhirnya sekarang lapangan sepak bola menjadi lebih bersih dan rapi.

Seluruh program telah terealisasi dengan baik dan masyarakat telah merasakan manfaat dari program-program tersebut. Tak hanya outputnya, masyarakat juga telah merasakan dampaknya selama proses kegiatan, sebab masyarakat dilibatkan pula dalam pengerjaan setiap program pembangunan. Masyarakat diberi kesempatan untuk berpartisipasi aktif di seluruh kegiatan dalam pengelolaan dana desa ini.

3. Dampak Sosial

Komponen penting dari adanya masyarakat adalah saling percaya antar sesama. Saling percaya muncul tidak dengan tiba-tiba. Tetapi akan muncul manakala para anggota masyarakat sudah saling menghargai dan saling jujur. Intinya menghargai dan saling jujur, yang kemudian di larang berbohong, merendahkan orang lain, mencaci, memaki.

Perilaku bagi individu dan apa yang mesti mereka lakukan dalam menjaga eksistensinya jika mereka memiliki norma yang berlaku dan disepakati bersama, apabila tidak ada maka tidak ada masyarakat melainkan hanya sekumpulan data. Program pembangunan pertanian, merupakan program untuk meningkatkan

output dan pendapatan para petani. Juga untuk menjawab keterbatasan pangan di pedesaan, bahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar industri kecil dan kerumahtanggaan, serta untuk memenuhi kebutuhan ekspor produk pertanian bagi negara maju. Program industrialisasi pedesaan, tujuan utamanya untuk mengembangkan industri kecil dan kerajinan. Pengembangan industrialisasi pedesaan merupakan alternative menjawab persoalan semakin sempitnya rata-rata pemilikan dan penguasaan lahan dan lapangan kerja dipedesaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan untuk desa Kaloling Kecamatan Sinjai Timur dalam hal peningkatan efektivitas penggunaan dana desa dalam program dibidang pembangunan desa.
2. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat untuk membantu dalam penyebaran informasi dan pemahaman mengenai program-program pembangunan yang akan dilakukan, sehingga masyarakat akan lebih berpartisipasi atau terlibat aktif dalam pelaksanaan program-program yang dilakukan oleh pemerintah desa
3. Menambah program yang mendukung sumber penghasilan warga desa yang berpotensi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
4. Meningkatkan minat swadaya masyarakat termasuk gotong royong yang mulai memudar di lingkungan desa Kaloling karena selalu berharap dengan insentif yang ada untuk terlaksananya asas pembangunan desa.

5. Memelihara sarana dan prasarana yang telah ada dengan sebaik-baiknya agar dapat dinikmati dalam jangka panjang.

DATA HASIL TES
SIKLUS I DAN SIKLUS II

No.	Nama	Tes		
		Tes Awal	Siklus I	Siklus II
1	Eriel elvian laloasa	63	80	90
2	A.M.Ghazi Al Ghifari.R	30	47	75
3	Adam	34	34	60
4	Ananda	69	67	80
5	Andi Farhan fayyath	50	70	65
6	Andi M.Edwar Aswar	47	50	85
7	Asraf	24	23	60
8	Bau Tenri	57	70	80
9	Dita Andiani Syam	71	47	60
10	Henri	48	67	65
11	Iin Amalia Putri	47	60	65
12	Junisar	39	46	60
13	Jusmawati	48	77	90
14	Kalvi Amalia	60	75	90
15	Muh. Alpar Sidiq	40	70	75

16	Muhammad Subhan Gugun	74	80	75
17	Nurfadillah	40	60	65
18	Nurfadillah	72	40	60
19	Rendi Pratama	95	60	60
20	Risky Apriani Razak	78	57	65
21	Sartika	63	50	65
22	Sulkifli	96	65	70
23	Sultan Agung	63	75	85
24	Ulam Sari	64	32	60
25	Wandi	47	70	80
26	Waldan Syatir Asri	71	75	75
27	Payung Al Faruq	22	80	90
Mean		55.57	60.25	72.22

DOKUMENTASI KEGIATAN

Pekerjaan Talud desa Kaloling



Pembangunan Drainase Dusun Bonto Sugi Desa Kaloling



Pekerjaan Rabat Beton Desa Kaloling





RIWAYAT HIDUP



Irsal Amir lahir di Sinjai pada tanggal 27 Januari 1992 anak kelima dari tujuh bersaudara, buah hati dan kasih sayang dari pasangan Muh. Amir dan Niswah. Penulis memulai pendidikan formal di SDN 07 Panreng 1998, dan tamat pada tahun 2004. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di MTSN Sinjai dan tamat pada tahun 2007. Penulis melanjutkan pendidikan di MAN 2 Sinjai Timur, hingga akhirnya tamat pada tahun 2010. Dan pada tahun 2011 penulis terdaftar pada Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar program strata 1 (S1). Atas ridho Allah SWT, dan dengan kerja keras, pengorbanan serta kesabaran, pada tahun 2018 Penulis mengakhiri masa perkuliahan S1 dengan judul Skripsi **PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Kaloling Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai)**"